

**EFEKTIVITAS PASAL 95 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2  
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN DISABILITAS**  
(Studi di Dinas Sosial Kota Malang, Masjid Agung Jami dan Gereja Immanuel Kota Malang)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum,

Oleh:

**MUHAMMAD TAUFIQ ARDIANSYAH**

**NIM: 125010100111110**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2018**

**HALAMAN SAMPUL JUDUL**

**EFEKTIVITAS PASAL 95 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2  
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN DISABILITAS**  
(Studi di Dinas Sosial Kota Malang, Masjid Agung Jami dan Gereja Immanuel Kota Malang)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum,

Oleh:

**MUHAMMAD TAUFIQ ARDIANSYAH**

**NIM: 125010100111110**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2018**

## EFEKTIVITAS PASAL 95 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN DISABILITAS

Muhammad Taufiq Ardiansyah, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., AgusYulianto,  
SH. MH

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: [taufiqardiansyah30@gmail.com](mailto:taufiqardiansyah30@gmail.com)

### ABSTRAK

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas Pada Bangunan Rumah Peribadatan kota Malang. Di Malang sendiri telah banyak bangunan rumah peribadatan yang mana juga tidak sedikit para jama'ah penyandang disabilitas yang membutuhkan aksesibilitas pada bangunan rumah peribadatan tersebut. Di kota Malang sendiri juga terdapat pasal yang mendukung pemenuhan aksesibilitas ini sendiri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yang pertama Apakah Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas sudah efektif di rumah ibadah kota Malang? Yang kedua Apa hambatan dan solusi dalam efektivitas Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kota Malang, Masjid Agung Jami Kota Malang, Gereja Immanuel. Data primer berupa wawancara, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa problematika mengenai pelaksanaan aksesibilitas pada bangunan peribadatan yang diterapkan di Kota Malang sendiri yakni Kota Malang sebagai salah satu Kota di Indonesia yang telah ramah terhadap penyandang disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas, tepatnya sejak dikeluarkan Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 adalah kurangnya sosialisasi antara Pemerintah dengan pengurus rumah peribadatan dan juga penyandang disabilitas yang mana mengakibatkan pasal tersebut tidak diketahui dan tidak sepenuhnya diterapkan pada bangunan rumah peribadatan di Kota Malang, masih ada beberapa fasilitas yang tidak disediakan, bangunan rumah peribadatan belum dapat dikatakan ramah terhadap penyandang disabilitas, persoalan terkait dana dan birokrasi.

Kata Kunci: *Hukum, Disabilitas, Aksesibilitas*

**THE EFFECTIVENESS OF ARTICLE 95 OF MALANG REGIONAL  
REGULATION NUMBER 2 YEAR 2014 ABOUT THE PROTECTION AND  
EMPOWERMENT OF PEOPLE WITH DISABILITIES**

**Muhammad Taufiq Ardiansyah, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Agus Yulianto,  
SH. MH**

Faculty of Law Universitas Brawijaya  
Email: [taufiqardiansyah30@gmail.com](mailto:taufiqardiansyah30@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Malang Regional Regulation No. 2 Year 2014 About Protection and Disability Empowerment in Building Houses Worship Malang city. In Malang itself has a lot of building a house of worship which is also not a few jama'ah people with disabilities that require accessibility to the building of the house of worship. In Malang city itself there are also articles that support the fulfillment of this accessibility itself.*

*Based on the above, this paper raised the first problem formulation Is Article 95 of Malang City Local Regulation No. 2 of 2014 on Protection and Disability Empowerment has been effective in the house of worship of Malang city? The second What are the obstacles and solutions in the effectiveness of Article 95 of Malang City Local Regulation No. 2 of 2014 on Protection and Disability Empowerment?*

*Then the writing of this paper using the method of juridical empirical with the method of sociological juridical approach. The location of the research was conducted at Social Department of Malang City, Great Mosque of Jami Malang City, Immanuel Church. Primary data in the form of interviews, secondary, and tertiary obtained by the authors will be analyzed by using qualitative descriptive data analysis techniques*

*From the results of research with the above method, the authors obtain answers to existing problems that the problematics about the implementation of accessibilitas in the building of worship that is applied in the city of Malang itself namely Malang as one of the cities in Indonesia that has been friendly to people with disability by providing accessibility, Article 95 of Malang City Regional Regulation Number 2 Year 2014 on Protection and Disability Empowerment. The obstacle faced by the Government in the implementation of Article 95 of Malang City Local Regulation No. 2 of 2014 is the lack of socialization between the Government and the dweller of the house of worship and also the persons with disability which cause the article is unknown and not fully applied to the building of the worship house in Malang There are some facilities that are not provided, building a house of worship can not be said to be friendly to people with disabilities, issues related to funds and bureaucracy.*

**Keywords:** Law, Disability, Accessibility

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Lampiran .....	vii
Ringkasan.....	viii
<i>Summary</i> .....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	8

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Teori Efektivitas .....	10
B. Kajian Umum Tentang Konsep Dasar Hak Asasi Manusia .....	13
C. Kajian Umum Tentang Hak Penyandang Disabilitas dan Ruang Lingkupnya .....	20
D. Kajian Umum Tentang Penyandang Disabilitas di Kota Malang .....	24
E. Pengertian Aksesibilitas .....	28
F. Pengertian Bangunan .....	31

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Metode Pendekatan Penelitian.....	33
C. Alasan Pemilihan Lokasi .....	34
D. Jenis Dan Sumber Data .....	35
E. Teknik Memperoleh Data .....	37



F. Populasi dan Sampel .....	38
G. Teknik Analisis Data .....	39

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
1. Pemerintah Kota Malang .....	40
2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Malang .....	51
3. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang.....	59
4. Gambaran Umum Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas .....	63
B. Efektivitas Pasal 95 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Mengenai Bangunan Rumah Ibadah di Kota Malang .....	70
C. Faktor Penghambat dan Solusi Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Ibadah di Kota Malang .....	84

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penulisan .....	2
Tabel 4.1 Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan .....	43
Tabel 4.2 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Di kota Malang .....	48
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kota Malang Berdasarkan Agama.....	49
Tabel 4.4 Data Penyandang Cacat Menurut Jenis Kecacatan Tahun 2011 .....	56
Tabel 4.5 Data Penyandang Cacat Menurut Jenis Kecacatan Tahun 2015 .....	57
Tabel 4.6 Data Penyandang Cacat Menurut Kecamatan dan Jenis Kecacatan Tahun 2017 .....	58



## DAFTAR LAMPIRAN

### A. LAMPIRAN 1 : SURAT-SURAT

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Kartu Bimbingan Skripsi
3. Surat Ijin Survey





## HALAMAN PENGESAHAN

### **EFEKTIVITAS PASAL 95 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO 2 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN DISABILITAS**

(Studi di Dinas Sosial Kota Malang, Masjid Agung Jami dan Gereja Immanuel Kota Malang)

Oleh :

**Muhammad Taufiq Ardiansyah**

**125010100111110**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, SH. MHum

Agus Yulianto, SH. MH.

NIP. 196008101986011002

NIP. 195907171986011001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Dekan Fakultas Hukum

Lutfi Effendi, SH. MHum

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si

NIP. 196008101986011002

NIP. 196208051988021001

## KATA PENGANTAR

Dengan Nama Allah Yang Maha Melapangkan lagi Maha Baik, Segala puji syukur senantiasa penulis haturkan kehadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam, yang karena rahmat dan pertolongan-Nya, karena kebaikan dan kebesaran-Nya lah, akhirnya penulis sampai pada tahap membanggakan dengan terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT ridho atas terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa menurunkan cahaya ilmu dan kemanfaatan bagi kita semua.

Sungguh penulis dengan hati berbahagia mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, Tuhan Yang MahaSuci, Pemilik Samudera Ilmu, atas segala pertolongan dan kasih sayang-Nya bagi kita semua, utamanya bagi penulis;
2. **Rasulullah Muhammad SAW**, atas ajaran dan sunnah-sunnah beliau yang begitu menginspirasi dan membawa kita semua menuju jalan yang lurus, jalan kebenaran;
3. Ayahanda Penulis, **Agus Jatmiko SE. MM** dan Ibunda Penulis, **Enny Wijayanti SH**, yang begitu penulis cintai dan banggakan, yang karena kasih sayang, semangat, doa, dan ajaran-ajaran beliau yang begitu menginspirasi, serta semua dukungan moril maupun materiil yang telah beliau berdua berikan kepada penulis sampai saat ini;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Yang Terpelajar Bapak **Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.**;
5. Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara, Yang Terpelajar Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi, Yang Terpelajar Bapak

**Lutfie Effendi, SH. Mhum** dan Yang Terpelajar Bapak **AgusYulianto, SH. MH**

6. Dosen Pembimbing Akademik penulis, Yang Terpelajar Bapak **Prof. Dr. Moh. Bakri. SH. MS**

7. Sahabat – sahabat dan pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas semangat, kepedulian, bantuan, dan masukan-masukan yang membangun yang sangat bermanfaat, dan memberi kesan begitu mendalam bagi penulis.

Masukan berupa kritik yang konstruktif, logis, dan membangun, serta saran yang solutif akan senantiasa penulis harapkan terkait kemungkinan adanya kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Semoga dari skripsi ini, terpancar banyak manfaat dan keberkahan bagi kita semua.

Malang, 1 Agustus 2017

Penulis

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ditegakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala aspek kehidupan dan norma-norma yang berlaku berlandaskan atas hukum. Negara hukum mengandung pengertian bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tidak ada satu pun yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum.<sup>1</sup>

Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan keadilan itu menjadi salah satu refleksi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini menggambarkan bahwa hukum pada dasarnya memiliki keterkaitan yang begitu erat dalam pelaksanaan hak asasi manusia.

Undang Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menyatakan bahwa Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.<sup>2</sup> Pada pasal tersebut jelas menerangkan bahwasanya setiap penyandang cacat memiliki hak yang sama dengan warga lainnya, tidak ada diskriminasi dan perbedaan. Karena HAM tidaklah bertumpu pada perbedaan suku, agama, bahkan kelainan fisik sekalipun. Kelainan fisik ataupun mental yang dialami oleh segelintir warga Indonesia bukanlah menjadi alasan untuk mereka tidak memperoleh haknya dari pemerintah.

Seperti yang telah diuraikan pada paragraf di atas, penyandang cacat memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara non disabilitas, penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, dan mempertahankan kehidupannya.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

<sup>2</sup> Pasal 5 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Selain hak untuk hidup, apabila membicarakan isu-isu mengenai hak asasi manusia kita juga dapat menemukan bahwa manusia sebagai warga negara memiliki hak sipil dan politik, serta memiliki hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak sipil dan politik dipandang sebagai hak-hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.<sup>3</sup>

Di kota Malang sendiri terdapat Peraturan Daerah yang mengatur masalah tersebut yang tertuang dalam Pasal 89 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas, setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas.<sup>4</sup> Namun, nyatanya mereka yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas masih sering kali mendapatkan kesulitan untuk mengakses bangunan-bangunan umum dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh instansi tersebut. Bangunan umum di kota Malang sendiri masih jarang ditemui yang sudah menyediakan aksesibilitas bagi difabel, seperti yang terdapat pada Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas, aksesibilitas pada sarana peribadatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam sarana keagamaan;
- b. tempat parkir dan tempat turun penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;

---

<sup>3</sup> Mengenal Kovenan Hak Sipil dan Politik, <http://indraswat.wordpress.com>, (diakses pada tanggal 21 Desember 2016)

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2014 Tentang Disabilitas



d. bahasa isyarat dalam setiap kegiatan keagamaan.

e. toilet;

f. tanda-tanda atau signage.

Kota Malang sendiri masih jarang ditemui bangunan rumah ibadah yang sudah menyediakan aksesibilitas tersebut bagi difabel, aksesibilitas bagi difabel tidak hanya diperlukan di tempat-tempat umum seperti pasar, kantor, sekolah atau moda transportasi saja, tetapi tempat ibadah juga perlu menyediakan akses bagi difabel. Seperti peneliti ketahui, ketersediaan akses di beberapa tempat peribadatan sentral di Kota Malang yaitu Masjid Agung Jami, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIBB) Immanuel, serta masih terdapat diskriminasi bagi penyandang difabel. Meskipun di Masjid Agung Jami telah menyediakan rump bagi pengguna kursi roda dan jalurnya langsung menuju shaf salat di dalam masjid. Tak jauh dari situ, tempat wudlu bagi kelompok disabilitas dan umum juga disediakan. Meskipun ramp sudah disediakan di lantai satu masjid, belum ada akses bagi difabel tuli, penerjemah bagi tuli ketika ada ceramah atau khutbah tidak ada di Masjid Agung Jami Kota Malang. Akan tetapi pemandangan berbeda terdapat di Gereja Emmanuel Elizabeth Mewo di pintu depan terlihat tangga berundak yang cukup kecil menuju bagian dalam gereja. Kondisi itu cukup menyulitkan difabel yang menggunakan kursi roda jika hendak masuk ke dalam gereja. Dari informasi yang didapat keberadaan difabel memang belum diperhitungkan dikarenakan sejauh ini masih tidak terdapat jemaat yang menyandang difabel jadi aksesnya belum ada.

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum untuk meninjau dan meneliti berbagai peraturan

perundang-undangan di Indonesia yang sekiranya berkaitan dengan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas tersebut. Penyandang disabilitas dalam Penjelasan Pasal 5 UU Penyandang Cacat terdiri dari cacat fisik, cacat mental dan cacat ganda yang merupakan penggabungan dari cacat fisik dan mental. Judul penelitian hukum ini adalah **"Efektivitas Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang No 2 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas."**

**Tabel 1.1**  
**Orisinalitas Penulisan**

No	Nama	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Tujuan
1	ANDI SULASTRI	TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYEDIAAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS	1. Bagaimanakah pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kota Makassar?  2. Bagaimanakah mekanisme	1. Untuk mengetahui pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kota Makassar

		DI KOTA MAKASSAR	dalam pelaksanaan dan implementasi aturan aksesibilitas penyangang disabilitas?	2.Untuk mengetahui mekanisme dalam pelaksanaan dan implementasi aturan aksesibilitas penyangang disabilitas.
--	--	---------------------	---	---

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas sudah efektif di rumah ibadah kota Malang ?
2. Apa hambatan dan solusi dalam efektivitas Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta menganalisis efektivitas Pasal 95 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas mengenai bangunan rumah ibadah di kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan upaya pemenuhan aksesibilitas rumah ibadah di kota Malang.

#### D. Manfaat Penelitian

Sebagai kajian hukum dan analisa hukum untuk mengembangkan Ilmu hukum dan dijadikan referensi dalam kaian hukum khususnya Hukum administrasi Negara.

##### a. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan acuan terhadap masyarakat bahwa kondisi sosial yang timbul ini merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak dapat di benarkan serta memberikan pengetahuan terhadap masyarakat bahwa tindakan tersebut dapat menimbulkan sanksi bagi para pelakunya.

##### b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharap kann dapat mengembangkan Ilmu pengetahuan di bidang hukum di dasarkan pada fakta di lapangan disertai peraturan-peraturan hukum dan sebagai ilmu yang bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya untuk mahasiswa yang berkaitan dengan pemberian perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang perlu di pelajari lebih lanjut lagi.

##### c. Bagi Pemerintah

Sebagai instrumen untuk merombak pola pandang berbagai pihak dan sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan penegakan hukum yang terkait dengan perlindungan penyandang disabilitas yang sangat perlu untuk dikaji lagi sehingga para penyandang disabilitas mampu dapat perlindungan hukum yang jelas dan untuk meningkatkan peran aktif pemerintah dalam penyediaan aksesibilitas di Kota Malang.

##### d. Bagi Penyandang Disabilitas

Kesamaan kesempatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dalam menikmati fasilitas umum agar menunjang hidup dan kehidupannya. Dan sebagai tambahan wacana, informasi dan pengetahuan terkait dengan implementasi kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas Pasal 91 ayat (1) Peraturan Daerah kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam Penulisan proposal skripsi ini didasarkan pada banyak bab dan sub bab yang akan dibahas, maka sistem penulisannya sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Di bab ini diuraikan secara mendalam mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, teori diperbolehkan melalui kajian pustaka serta jurnal Ilmiah. Kajian teori yang diuraikan penelitian ini yaitu mengenai pemberdayaan Penyandang Disabilitas terkait Penyediaan Aksesibilitas pada bangunan pendidikan.



### **BAB III : METODE PENELITIAN**

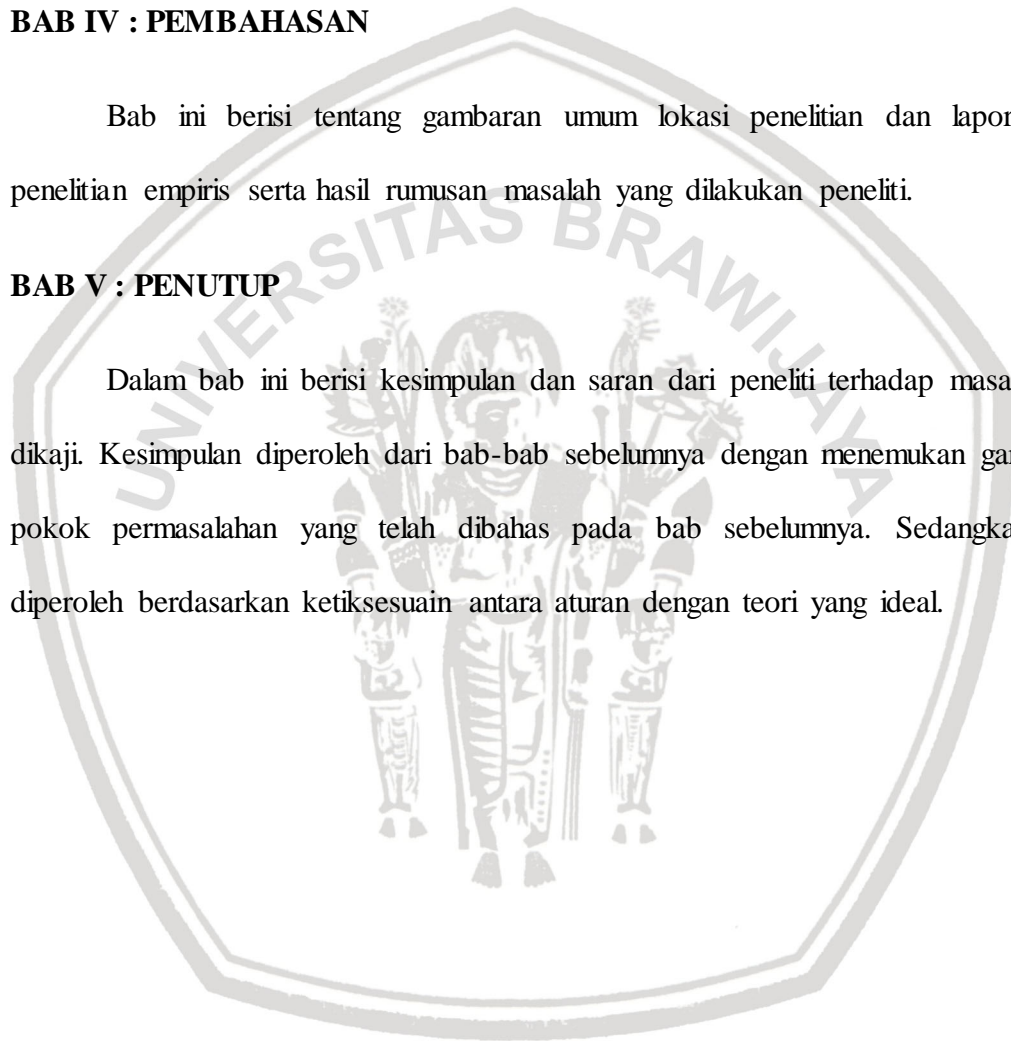
Dalam bab ini berisi jenis, pendekatan penelitian, jenis data, alasan pemilihan lokasi, jenis sumber data, teknik pengambilan data, populasi dan sampel, teknik analisa data, dan definisi operasional.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan laporan hasil penelitian empiris serta hasil rumusan masalah yang dilakukan peneliti.

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti terhadap masalah yang dikaji. Kesimpulan diperoleh dari bab-bab sebelumnya dengan menemukan garis besar pokok permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Sedangkan saran diperoleh berdasarkan ketiksesuain antara aturan dengan teori yang ideal.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum tentang Teori Efektivitas

Efektivitas adalah suatu tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu lembaga ataupun suatu kegiatan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Efektivitas memiliki arti adanya efek (pengaruh, akibat) terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat keefektifitasannya. Arti penegakan hukum ialah suatu proses dengan melakukan segala upaya sehingga norma-norma hukum yang ada di masyarakat bisa berfungsi dan dapat dijadikan pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Teori Efektivitas Hukum yang sering dipakai adalah teori dari seorang pakar hukum bernama Lawrence M. Friedman dengan teori “legal system” yang terdiri dari tiga komponen pokok, antara lain sebagai berikut:

1. Substansi Hukum (berupa perundang-undangan)

Yang dimaksud dengan substansi hukum ialah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam system, jadi substansi hukum merupakan sebuah produk hukum materil atau isi dari undang-undang yang mengharuskan norma addresat untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu.

2. Struktur hukum (aparatur penegak hukum)

Struktur hukum yang merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi. Friedman menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari system hukum adalah struktur hukum, tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga.

3. Kultur hukum (perilaku masyarakat)

Maksud dari budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama-sama yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negative.

Ketiga elemen dalam teori efektivitas atau teori penegakan hukum tersebut merupakan suatu lingkaran yang berkesinambungan satu sama lain. Ketiga elemen tersebut lebih bersifat kumulatif bukan alternative sehingga jika ingin mencapai tingkat efektivitas yang tinggi maka ketiganya harus terpenuhi.

Produk hukum yang ada dalam masyarakat merupakan produk hukum buatan manusia maka akan jauh dari kata sempurna, ketika sudah ada produk hukum yang dibentuk diharapkan pihak-pihak yang bersangkutan termasuk masyarakat mampu melaksanakannya dengan baik dan benar.

Struktur hukum merupakan institusionalisasi dalam pelaksanaan produk hukum (substansi) yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam tatanan kelembagaan penegak hukum sendiri harus mampu bekerja secara optimal, baik dari masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum lainnya. Karena kualitas dari masing-masing pribadi penegak hukum sangat berpengaruh terhadap suatu produk hukum.

Kultur budaya memegang peranan penting dalam sebuah penegakan hukum, dilandasi dengan kebiasaan maka akan terbentuk budaya dimana bisa dijadikan tolak ukur dari suatu aktivitas sosial dimasyarakat. Ketika masyarakat mempunyai kultur budaya baik maka akan selalu menjunjung tinggi suatu kebaikan, namun kenyataannya masyarakat masih sulit untuk taat pada peraturan yang berlaku di Indonesia ini sehingga terkadang hukumnya sudah ada namun realisasinya belum ada sehingga terkesan mati dan tidak berfungsi.

Selain itu, pengertian efektivitas dijelaskan juga oleh Soerjono Soekanto. Kata Efektif adalah merupakan suatu susunan kata yang berasal dari kata effective dalam artian bahasa Inggris yang memiliki pengertian segala sesuatu yang telah disusun atau direncanakan dapat dilakukan dengan baik dan dapat memberikan dampak dan memberi suatu kemanfaatan. Efektivitas adalah suatu unsur- unsur yang utama yang dipakai atau dimanfaatkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah disusun atau direncanakan dalam kurun waktu sebelumnya. Pada suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya. Efektivitas dapat dikatakan mencapai suatu keberhasilan atau tidaknya dapat ditinjau dari seberapa besar ketercapaian yang didapat dari suatu tujuan yang ditetapkan, jika semakin besar keberhasilann kegiatan dan tujuan dalam mendekati sasaran, maka dapat dikatan semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya.

Efektivitas dalam hal yang paling mendasar adalah mengenai suatu tentang hal keberhasilan ketercapaian atau tidak tercapainya suatu tujuan yang diharapkan maupun telah direncanakan sebelumnya, sehingga suatu hal dapat dikatan dapat bekerja secara maksimal apabila dalam hal ketercapaian targret dapat tercapai atau setidaknya mendekati dari apa yang direncanakan dan yang dirumuskan.

## **B. Kajian Umum Tentang Konsep Dasar Hak Asasi Manusia**

Salah satu ciri yang dimiliki oleh umat manusia adalah memiliki pandangan subjektif tentang sesuatu yang diketahui atau dialaminya. Aspek sibjektivitas yang dimiliki olveh manusia inilah yang menjadikan seluruh pandangan manusia yang sering kali diklaim sebagai suatu kebenaran adalah bersifat relative, tidak mutlak.

Pengertian kebenaran universal yang sering kali dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya jika sampai pada implementasinya pasti akan

tersentuh oleh interpretasi (subjektivitas) manusia, dan ini memang mustahil untuk dihindari.

Beberapa faktor seperti budaya, keyakinan agama, dan solidaritas (politis),<sup>1</sup> akan menjadi faktor yang bisa mempengaruhi pemikiran manusia yang pada akhirnya akan memengaruhi juga sikap dan pandangan masyarakat terhadap rasa keadilan.

Jika kita mencermati konsep Negara hukum seperti yang terurai di atas, tampak suatu paradigma kenegaraan dari sisi bangunan Negara. Namun, bentuk pengejawantahan paradigma kenegaraan tersebut sebagai suatu bangunan Negara hukum, baru dapat terlihat apa bila bangunan tersebut dilengkapi dengan struktur Negara dan mekanisme operasionalnya.

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat. Adapun asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun mahluk dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya. Misalnya, hak hidup, yang mana tak satupun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain.<sup>2</sup>

Menurut Jan Materson dari Komisi HAM PBB sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dr Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H., **Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum**, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 95

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 282

<sup>3</sup> Baharuddin Lopa, **Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia**, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, hlm. 52.



Mengingat pembentukan Negara dalam sistem demokrasi dan Negara hukum merupakan kehendak rakyat secara kolektif, maka pemerintah bersama semua elemen penyelenggara Negara lainnya yang dilekati kewajiban untuk bertindak atau mengambil kebijakan sesuai batas kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Negara, semua itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder Negara.

Salah satu tanggungjawab yang harus dilakukan oleh penyelenggara Negara kepada rakyat atau warga negaranya adalah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Hal tersebut diamanatkan sendiri oleh UUD 1945 khususnya pada pasal 28 (i) ayat 4 hasil amandemen ke-2 yaitu:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab Negara, terutama pemerintah.”

Dalam sejarah konstitusi negara Republik Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM) yang pada awalnya diatur dalam UUD 1945, namun aturan tersebut ternyata belum mampu mewadahi dan menyelesaikan segala bentuk perkara HAM. Dimana hal ini menjadi momentum yang panjang dan sulit untuk diperjuangkan, karena adanya perbedaan pendapat/pandangan daripada pendiri negara mengenai hakekat Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri.

Pada saat itu hakekat Hak Asasi Manusia (HAM) diidentikkan dengan ideologi liberalis yaitu merupakan paham terhadap pengakuan hak individu secara menyeluruh. Hal inilah yang dianggap tidak cocok dan bertolak belakang dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Namun setelah waktu yang cukup panjang, akhirnya Hak Asasi Manusia di Indonesia diakui dan secara terbuka mulai diatur dalam konstitusi maupun undang-undang. Dari masa orde lama dan orde baru penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia

masih sangat minim. Tetapi, dengan adanya reformasi membawa angin segar terhadap penjaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Terbukti dengan diaturnya pasal dalam konstitusi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu pada pasal 28A-28J dan Undang-undang No. 39 tahun 1999.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sekalipun juga, hak asasi manusia diatur dalam pembukaan dan dalam batang tubuh. Pada pembukaan ada disebutkan tentang hak kemerdekaan. Sedangkan pada batang tubuh diatur dalam Bab X tentang Hak Asasi Manusia:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.<sup>4</sup>

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.<sup>5</sup>

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>6</sup>

Dengan lahir dan hadirnya beberapa aturan yang menjadi payung bagi hak asasi manusia ini cukup memperlihatkan bahwasanya hak asasi manusia ini sangat dijaga dan diperhatikan sungguh sungguh oleh Negara.

Penegakan hak asasi manusia ini tentunya menjadi hal yang tak kalah penting bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, selain dimuat dalam Undang Undang Dasar 1945 dan dijabarkan melalui Undang-undang No. 39 Tahun 1999, juga dibentuk

---

<sup>4</sup> Pasal 28A, Undang Undang Dasar 1945

<sup>5</sup> Pasal 28B Ayat (1), Undang Undang Dasar 1945

<sup>6</sup> Pasal 28B Ayat (2), Undang Undang Dasar 1945

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Keseriusan pemerintah menegakkan HAM ini juga dapat diperhatikan dengan adanya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Tidak hanya itu, secara umum Undang Undang HAM membagi HAM ke dalam beberapa kategori yang semuanya tertuang secara jelas dalam Undang Undang tersebut, seperti di bawah ini:

1. Hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa;
2. Hak memperoleh keadilan;
3. Hak atas kebebasan pribadi;
4. Hak atas rasa aman;
5. Hak atas kesejahteraan;
6. Hak turut serta dalam pemerintahan;
7. Hak wanita;
8. Hak anak; dan
9. Hak atas kebebasan beragama.

Kesembilan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam Undang Undang HAM tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap HAM di Indonesia.

Selain itu, berikut juga ruang lingkup hak asasi manusia, sebagai berikut:

1. setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

2. setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
3. setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
4. setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
5. setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.
6. setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.
7. setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
8. setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>7</sup>

Deskripsi tentang kewajiban penyelenggara negara seperti yang tergambar diatas, merupakan bentuk pengejawantahan konsep Good Governance yang belakangan ini marak dipromosikan sebagai era baru tata kelola pemerintahan yang baik. Bagaimana tidak, karena untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, **Filsafat Hukum** Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 91-92

serta kemajuan yang lebih tinggi pada setiap bangsa, maka sebagian besar ditentukan oleh tata kelola pemerintahannya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya berorientasi pada tiga elemen utama yakni, pemerintahan atau negara (*state*), sektor swasta (*private sector*), dan masyarakat (*society*) serta ditambah lagi dengan interaksi antar ketiga elemen tersebut.

Ketiga elemen tersebut di atas masing-masing memiliki fungsinya sendiri yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan mempunyai hubungan yang saling bersinergi. Fungsi dari masing-masing elemen tersebut antara lain: negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta berfungsi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan dan masyarakat ikut berperan positif dalam interaksi sosialnya, baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah dipahami bahwa asas umum tata kelola pemerintahan yang baik adalah tuntutan moral yang hingga kini telah menjadi norma hukum bagi penyelenggara Negara (UU No. 28/1999), untuk menggunakan segala kewenangan dalam melaksanakan tugas dengan tindakan bahkan sampai pada penggunaan *freis ermesen* demi mewujudkan esensi tujuan negara hukum sebagaimana yang digagas Immanuel Kant dan Friedrich Julius Staal.

Hal yang sama juga terjadi pada HAM karena secara substansial HAM mengandung nilai-nilai universal. Namun, jika nilai HAM itu sampai pada definisi operasional, ia akan bernilai relatif.

---

<sup>8</sup> Sedarmayanti, 2003, **Good Governance, (Pemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Upaya membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Rekonstruksi dan Pemberdayaan**, Mandar Maju, Bandung



### C. Kajian Umum Tentang Hak Penyandang Disabilitas dan Ruang Lingkupnya

Berlatar dari gambaran umum tentang penyandang disabilitas, yang baik secara fisik maupun mental mengalami gangguan atau biasa disebut dengan disfungsi.

Kekurangan inilah yang biasa dirasakan oleh penyandang disabilitas sebagai sebuah diskriminasi sehingga kerap memperoleh perlakuan yang tidak manusiawi. Padahal, seyogyanya penyandang disabilitas diperlakukan layaknya manusia biasa.

Walau sebetulnya, diskriminasi juga kerap lahir karena perbedaan ideologi oleh beberapa kelompok tertentu. Namun, hal ini tidak berlaku bagi penyandang disabilitas. Mereka memperoleh perlakuan diskriminatif lantaran karena mereka berbeda secara fisik maupun mental.

Secara konseptual, diskriminasi umumnya terjadi apabila terdapat suatu kelompok atau golongan yang secara formal maupun informal berkedudukan lebih tinggi, atau lebih mapan secara materi, ataupun memiliki kuasa atas suatu kaum. Akibat ini semua, maka kelompok tertentu merasa marah karena kelompoknya diinjak-injak.

Natan Lerner pernah mengemukakan bahwa berbagai macam perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami oleh kelompok tertentu, awalnya dimulai dari persangkaan buruk, pengabaian dan hingga sampai pada kebencian yang didasarkan atas pembedaan etnis, ras, atau warna kulit.<sup>9</sup>

Persoalan tersebut di atas, dapat timbul di berbagai kelompok masyarakat dalam bentuk kekerasan yang sama dengan dimulainya perlakuan yang berdasarkan pembedaan dengan target kelompok yang tidak berdasarkan etnis, ras, budaya, suku dan bahasa.

---

<sup>9</sup> Natan Lerner, 1991, **Diskriminasi dan Perlindungan HAM**, terjemahan PT Sumber Baru, Jakarta., Hlm. 23.

Kelompok yang dimaksud di sini adalah anak-anak, perempuan penyandang disabilitas, orang lanjut usia, buruh, dan kelompok masyarakat adat terutama suku terasing.<sup>10</sup>

Diskriminasi yang sama pernah ditemukan dalam kaitan relasi antara Pribumi dan Tionghoa di Indonesia, diskriminasi oleh kelompok mayoritas terhadap kaum minoritas. Akar sosiologis yang menimbulkan diskriminasi adalah:

1. Adanya dua kelompok yang secara terpisah menguasai sector kehidupan dalam masyarakat; dan
2. Kebudayaan yang berbeda, termasuk perbedaan agama.

Selama ini pemerintah Indonesia belum sungguh-sungguh membiasakan dan menerima tanpa reserve akan kondisi kebhinekaan bangsanya. Walaupun Indonesia kerap kali disebut-sebut sebagai bangsa yang damai kendati diisi dengan berbagai perbedaan suku, budaya, agama dan ras. Namun, perlu diperhatikan bahwa promosi tersebut lebih terkesan sebagai retorika politik dan kurang mencerminkan kondisi sesungguhnya.

Kerangka perbedaan antara persamaan yang bersifat alamiah, bersifat social, dan persamaan secara hukum sesungguhnya akan menghasilkan teori alamiah. Untuk persamaan yang alamiah, ditegaskan bahwa tidak ada persamaan di antara manusia dalam tradisi alamiah, kecuali beberapa segi dalam hal bentuk dan pembawaan asalnya (fitri). Demikian pula, bahwa tidak ada persamaan social, mengingat manusia itu berbeda-beda tingkat kekayaannya, kemuliaannya, asal-usul maupun keturunannya.

Berbeda halnya dengan persamaan alamiah dan persamaan social, persamaan secara hukum dan perundang-undangan terletak pada persamaan seluruh manusia di

---

<sup>10</sup> Ruswati Suryasaputra, 2006, **Perlindungan Hak Asasi (Bagi kelompok khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan)**, PTIK, Press Jakarta.

depan hukum (undang-undang), bukan saja dari segi hak-haknya, tetapi juga dari segi kewajiban dan perlindungan hukumnya. Persamaan inilah yang ditetapkan dalam berbagai konstitusi dan hukum positif dalam negeri serta dalam hukum internasional.<sup>11</sup>

Persoalan diskriminasi ini tentunya tidak seharusnya terjadi. Penyandang disabilitas sama saja dengan manusia biasanya yang memerlukan kondisi lingkungan yang sehat dan tidak berada dalam kungkungan ketakutan akibat diskriminasi yang berkepanjangan. Manusia selayaknya manusia berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Juga bagi penyandang disabilitas yang harus diperlakukan sama dengan yang lainnya.

Minoritas bukan menjadi alasan penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlakuan diskriminatif. Penyandang disabilitas juga tak jarang menoreh prestasi di Indonesia, sama dengan nondisabilitas.

Pelembagaan istilah kelompok khusus terutama penyandang disabilitas, memiliki konsekuensi secara sosioyuridis khususnya pada soal hak dan kedudukan dalam struktur sosial. Hal ini telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendefinisikan hak-hak kelompok khusus dengan berbagai pendekatan.

Salah satu bentuk pengkongkretan hak kelompok khusus dimaksud dari sudut hukum, dapat dijumpai pada memorandum yang dipersiapkan oleh Sekretaris Jenderal PBB 1950. Dalam memorandum tersebut antara lain ditegaskan bahwa interpretasi harfiah sudah tidak relevan untuk kondisi tertentu yang mana definisi mengenai kelompok khusus sudah berkembang hingga kepada setiap jenis komunitas dalam suatu Negara.

---

<sup>11</sup> Jayadi Damanik, **Advokasi Dalam Rangka Perlindungan, Pemenuhan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia**, (Makalah dalam Rakernas Pertuni, Januari 2007, Jakarta), hal:3

Komunitas yang dimaksud dapat saja keluarga, kelas sosial, kelompok secara kultural, dan lainnya. Oleh karena itu memorandum tersebut lalu menyatakan bahwa dibutuhkan definisi tertentu yang dapat memuat pengertian tentang komunitas yang membedakannya dengan kelompok penguasa.<sup>12</sup>

#### **D. Kajian Umum Tentang Penyandang Disabilitas di Kota Malang**

Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.<sup>13</sup>

Dalam pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan seperti yang disebutkan di atas dan memiliki hambatan lantaran tidak mendapatkan kesetaraan atau yang biasa disebut sebagai aksesibilitas. Berikut beberapa definisi mengenai tunanetra:

1. Tunanetra menurut Departemen Sosial

Tunanetra menurut Departemen Sosial adalah seseorang yang tidak dapat menggunakan indera penglihatannya untuk melakukan aktifitas sosial secara normal.

2. Tunanetra menurut Departemen Pendidikan Nasional (yang sekarang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan)

Tunanetra adalah seseorang yang masih berusia sekolah dengan mata yang tidak dapat melihat tulisan di papan tulis atau buku cetak secara normal.

3. Tunanetra menurut Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni)

---

<sup>12</sup> Ruswati Suryasaputra, op. Cit, hlm. 15-16

<sup>13</sup> Pasal 1 Undang-undang No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Tunanetra menurut Pertuni adalah seseorang yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 font dalam keadaan cahaya normal meski dibantu dengan kacamata (kurang awas).

#### 4. Tunanetra Menurut BPS

BPS menilai seseorang sebagai tunanetra berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan sendiri sebagai informan prime atau dari unsure keluarga sebagai informan sekunder, keterangan mana dicatat oleh petugas atau dituliskan oleh informan dalam formulir.<sup>14</sup>

Jika merujuk pada kerancuan atau invaliditas data seperti itu, amal populasi penyandang disabilitas cukup banyak yang didasarkan pada estimasi dan inipun lagi-lagi berbeda dari instansi yang satu dengan instansi lainnya.

Estimasi WHO menentukan jumlah populasi penyandang disabilitas adalah 10% dari total penduduk. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2004 adalah 218.868.791, jadi jumlah populasi penyandang disabilitas menurut WHO adalah  $218.868.791 \times 10/100 = 21.886.879$ , sedangkan estimasi Departemen Sosial terhadap populasi penyandang disabilitas di Indonesia adalah 3,11% dari total penduduk. Dengan demikian maka jumlah populasi penyandang disabilitas di Indonesia tahun 2004 adalah  $218.868.791 \times 3,11/100 = 7.037.681$ .

---

<sup>14</sup> Saharuddin Damming, 2009, **Paradigma Perlakuan Negara Terhadap Hak Penyandang Cacat Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia**, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin.



Hal inilah yang kerap mengundang keprihatinan bagi penyandang disabilitas maupun beberapa komunitas yang giat menyuarakan hak-hak konstitusional para penyandang disabilitas.

Pasalnya, beberapa hal yang harusnya menjadi hak para penyandang disabilitas malah terabaikan akibat sikap kurang pedulinya pemerintah, bahkan beberapa lapisan masyarakat sekalipun yang kerap melakukan sikap diskriminatif kepada mereka.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2004, diketahui jumlah penyandang cacat di Indonesia adalah 6.571.556 jiwa dengan sebaran menurut klasifikasinya, adalah:

- a. Tunanetra 1.810.829 orang;
- b. Tunarungu wicara 1.745.609 orang;
- c. Tunagrahita 2.811.173 orang; dan
- d. Tunadaksa 203.955 orang.

Sulawesi Selatan adalah provinsi terbanyak keempat dengan jumlah 270.182 jiwa dan Kota Makassar dihuni 2.250 orang penyandang disabilitas (disabilitas tubuh, disabilitas netra, disabilitas ganda).

Berdasarkan hal riset terhadap penyandang disabilitas pada tahun 1999-2000, maka 43% adalah penduduk usia sekolah 5-18 tahun atau kurang lebih 628.343 anak. Pada tahun 1999-2000 hanya 46.063 anak yang terdaftar atau kurang lebih dari 10% walau tidak diketahui jumlah penyandang disabilitas yang ada di sekolah umum.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hasil susenas (Modus Sosial Budaya) tahun 2000 dapat diketahui bahwa kecacatan dapat terjadi karena berbagai factor yaitu bawaan sejak lahir, akibat kecelakaan/korban kriminalitas atau bencana alam dan juga karena penyakit.

Dibandingkan dengan penyebabkecacatan lainnya, bawaan sejak lahir merupakan penyebab kecacatan terbanyak (44,88%). Adapun pemenuhan hak atas pendidikan penyandang disabilitas masih memprihatinkan, karena sebanyak 43,17% tidak/belum pernah sekolah, sedangkan penyandang disabilitas yang berhasil menamatkan pendidikan pada tingkat atau sederajat SMU hanya 7,45 %.

Sementara itu, penyandang disabilitas yang mengikuti kursus keterampilan hanya 1,34% dengan jenis kursus terbanyak yang diikuti adalah pertukangan dan kerajinan.

Ditinjau dari aktivitas social ekonomi, presentase penyandang disabilitas berumur 5-18 tahun yang sudah membantu penghasilan orangtua sebanyak 13,66%, terdiri atas 7,96% di perkotaan dan 16,86% di pedesaan. Sementara penyandang disabilitas berumur 10 tahun ke atas yang tidak bekerja/mencari pekerjaan, tidak sekolah dan tidak mengurus rumah tangga adalah sebanyak 52,4%.

Hal ini dikarenakan disabilitas yang melekat pada dirinya membatasi ruang gerak dan kebebasannya untuk melakukan kegiatan yang meminta pertanggungjawaban untuk memperoleh pekerjaan dan berada di rumah dan mengurus rumah tangga. Hanya 31,26% penyandang disabilitas yang bekerja, sedang yang mengurus rumah tangga sekitar 11,66%.

Padahal, demi bertahan hidup penyandang disabilitas membutuhkan pekerjaan dan penghidupan yang layak agar bisa bertahan di tengah peliknya kehidupan. Kesempatan bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak, tercantum dalam UU

No. 4 Tahun 1997 Bab 5 Pasal 6, yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya.

Dari jumlah penyandang disabilitas yang bekerja, 53,96% sebagai buruh dan menerima upah dari sketor swasta, sedang yang menjadi buruh dengan penghasilan tidak tetap adalah 46,06%.<sup>16</sup>

#### **E. Pengertian Aksesibilitas**

Aksesibilitas adalah kemudahan untuk dicapai oleh orang lain, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Kemudahan akses tersebut dapat diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya. Penjelasan mengenai pengertian aksesibilitas juga telah dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 30/PRT/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Umum, yaitu kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.<sup>17</sup>

Dengan begitu, aksesibilitas juga berkaitan dengan kemudahan dalam melalui dan menggunakan bangunan dengan memperhatikan kelancaran serta keselamatan, penerapan aksesibilitas sudah seharusnya diterapkan pada semua bangunan terutama pada bangunan pendidikan. Hal ini dilakukan untuk menunjang kebutuhan penyandang disabilitas.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 30/PRT/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Umum

Dalam hal penyediaan aksesibilitas dalam suatu bangunan, terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan :<sup>18</sup>

- (1) Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- (2) Kemudahan, semua orang dapat mencapai suatu tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan.
- (3) Kegunaan, semua orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang berada dalam suatu lingkungan.
- (4) Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Keempat aspek tersebut merupakan asas yang perlu diperhatikan dalam mendesain, selain itu diperlukan pula adanya kerja sama dari berbagai pihak sehingga keberadaan aksesibilitas bagi semua orang dapat terwujud dengan baik, terlebih khususnya untuk penyandang disabilitas.

Ketidaksamaan hak dan kewajiban masih terlihat dimasyarakat. Salah satunya adalah keterbatasan penyediaan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum contohnya fasilitas pada Bagunan pendidikan. Hal ini terlihat masih banyak insrastuktur di Indonesia yang tidak bisa digunakan yang hanya bisa digunakan oleh orang yang memiliki dua kaki, bahkan di fakultas hukum Universitas Brawijaya saja belum memiliki infrastuktur yang bisa digunakan oleh penyandang disabilitas. Bagaimana seorang yang memiliki kelainan dalam fisiknya bisa mengenyam pendidikan jika tidak ada fasilitas yang mendukung untuk dirinya.

---

<sup>18</sup> ibid

Pada kenyataannya sampai saat ini pembangunan gedung-gedung di Indonesia baik gedung perkantoran, sekolah, kampus, bandara, terminal, hotel dan lainnya sebagian besar cenderung belum mencerminkan keadilan bagi semua orang, dikarenakan belum dapat digunakan oleh kelompok masyarakat yang memiliki kecacatan atau keterbatasan fisik.

Saat ini Indonesia telah memiliki macam-macam organisasi penyanggah disabilitas, baik tingkat nasional maupun daerah. Organisasi Nasional di sini misalnya ;

- a. Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).
- b. Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI)
- c. Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas (HWDI), dan lain-lain.

Organisasi-orang-orang ini telah bekerja keras untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan sekaligus mengembangkan kapasitas mereka. Namun, dalam menjalankannya mereka seringkali mengalami kendala baik dari segi anggaran maupun sumber daya.<sup>19</sup>

#### **A. Pengertian Bangunan**

Bangunan adalah wujud fisik dari hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau di air. Bangunan biasanya digambarkan dengan rumah, gedung ataupun segala sarana prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun

---

<sup>19</sup> 2013, *Konvensi Hak Penyandang Disabilitas*, Direktorat HAM, Jakarta, hal.15.



peradabannya seperti halnya jembatan dan kontruksinya serta rancangan, jalan, sara telekomunikasi, dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang bangunan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Tentang Bangunan)<sup>20</sup>, diatur bahwa setiap bangunan harus menyediakan fasilitas/infrastruktur untuk penyandang disabilitas, kecuali perumahan pribadi. Selain itu juga, ada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan ini mengatur bahwa setiap penyelenggaraan fasilitas umum dan infrastruktur harus menyediakan aksesibilitas yang setara.



---

<sup>20</sup> Undang-Undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Empiris yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di dalam masyarakat dan menganalisa tindakan institusi pemerintah dalam praktek kehidupan masyarakat.

#### B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis karena penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi suatu peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sosial masyarakat. Sosiologi jelas merupakan ilmu yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi yang bersifat empiris yang berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak spekulatif.<sup>1</sup>

#### C. Alasan Pemilihan Lokasi

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1982, hlm.13.

Dalam rangka pengumpulan data, informasi dan dasar-dasar hukum dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian dilakukan pada :

1. Dinas Sosial Kota Malang
2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang
3. Rumah Ibadah (Masjid Agung Jami Kota Malang dan Gereja Immanuel Elizabeth)

Alasan memilih Studi di Lembaga Pemerintah dan Rumah Ibadah di Kota Malang karena Malang sendiri memiliki penduduk mayoritas beragama dan hingga sampai saat ini masih banyak ditemukan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas pada bangunan rumah ibadah ataupun pada bangunan umum yang belum memenuhi standar kebutuhan penyandang disabilitas. Yang perlu di telaah adalah Masjid Agung Jami Kota Malang dan Gereja Immanuel Elizabeth seharusnya sudah menunjang atau memenuhi kebutuhan agar mereka dapat melakukan kegiatan-kegiatan seharinya dan seperti bangunan fisik yang di bangun oleh pemerintah. Dengan demikian terbukti bahwa implementasi tersebut tidak berjalan dengan baik.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data adalah macam-macam informasi yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat, harapan dan lain-

lain dari subyek penelitian (nara sumber, informan, responden, dan lain-lain). Data sekunder adalah informasi yang berupa dokumen yang terdiri dari arsip, laporan, notulensi, risalah, perjanjian dan lain-lain. Sumber data adalah tempat ditemukannya informasi. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari subyek penelitian secara langsung. Sumber data sekunder berasal dari lembaga, institusi, atau individu.<sup>2</sup>

Data dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data yaitu jenis dan sumber data primer dan jenis dan sumber data sekunder.

### 1. Jenis Data

Secara umum, maka di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya; data empiris) dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar dan yang kedua diberi nama data sekunder.<sup>3</sup>

#### a. Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer ialah data yang dikumpulkan dari tangan pertama dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan.<sup>4</sup>

#### b. Data Sekunder

Pengertian data sekunder adalah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengolahnya sebelumnya.<sup>5</sup> Data ini mencakup peraturan

---

<sup>2</sup> Pedoman penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun akademik 2012/2013, hlm. 23-24.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm.51

<sup>4</sup> Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang, 2009, hlm.112

<sup>5</sup> *Ibid.*

perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

## **2. Sumber Data**

Sumber data adalah sumber peneliti mengamati, bertanya atau membaca berkenaan dengan variable yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **a. Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah diperoleh dari hasil wawancara yang mendalam dengan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan kota Malang.

### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan di PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Kota Malang.

## **E. Teknik Memperoleh Data**

Teknik memperoleh data adalah cara untuk memperoleh informasi. Data primer diperoleh melalui wawancara, baik terstruktur ataupun tidak terstruktur, dan pengamatan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen berkas-berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber, penelusuran situs di internet, klipping koran dan lain-lain.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini.

### **1. Wawancara**

---

<sup>6</sup> Pedoman penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun akademik 2012/2013, hlm. 24.



Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>7</sup> Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan pejabat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan kota Malang.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat arsip-arsip atau mengumpulkan data dari arsip-arsip, dokumen-dokumen yang terkait dengan materi penelitian ini. Dalam hal ini dokumentasi dilakukan dengan cara menyalin, mencatat, ataupun meringkas dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian ini.

## F. Populasi Dan Sampel

### A. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang dan atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dapat dibatasi pada periode dan lokasi tertentu.<sup>8</sup> Cara populasi dilakukan apabila pengambilan subjek penelitian meliputi keseluruhan populasi yang ada.<sup>9</sup> Populasi dari penelitian ini adalah instansi pemerintah terkait dengan pelaksanaan aksesibilitas tersebut.

### B. Sampel

Sampel adalah bagian yang mewakili populasi.<sup>10</sup> Sedangkan cara sampel adalah pengambilan subjek penelitian dengan cara menggunakan sebagian dari populasi yang ada.<sup>11</sup> Sampel responden dalam penelitian ini adalah pejabat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang.

---

<sup>7</sup> Muslan Abdurrahman, op.cit, hlm.114

<sup>8</sup> Pedoman penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun akademik 2012/2013, hlm. 24.

<sup>9</sup> Muhammad Idrus, **Metode Penelitian Ilmu Sosial**, Erlangga, Yogyakarta, 2009, hlm.93

<sup>10</sup> Pedoman penulisan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun akademik 2012/2013, hlm. 24.

<sup>11</sup> Muhammad Idrus, op.cit, hlm. 93

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu pembahasan dilakukan dengan cara menggambarkan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh untuk kemudian mengadakan analisis terhadap data tersebut, dengan tujuan agar dapat dideskripsikan segala fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaannya.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Pemerintahan Kota Malang

Pembentukan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Malang didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2014, yang terdiri dari :
  - 1) Sekretaris Daerah;
  - 2) Asisten Administrasi Pemerintahan, mengkoordinasi :
    - a) Bagian Pemerintahan;
    - b) Bagian Hukum;
    - c) Bagian Organisasi;
  - 3) Asisten Administrasi Pembangunan, mengkoordinasi :
    - a) Bagian Pembangunan;
    - b) Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah;
    - c) Bagian Kerja Sama dan Penanaman Modal;
  - 4) Asisten Administrasi Umum, mengkoordinasi :
    - a) Bagian Hubungan Masyarakat;
    - b) Bagian Umum;
    - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - 5) Sekretariat DPRD terdiri atas :

- a) Bagian Umum;
  - b) Bagian Keuangan;
  - c) Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga;
  - d) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- 6) Staf Ahli :

- a) Bidang Hukum dan Politik;
- b) Bidang Pemerintahan;
- c) Bidang Pembangunan;
- d) Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
- e) Bidang Ekonomi dan Keuangan;

b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah, yang terdiri dari :

- 1) Dinas Pendidikan;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- 4) Dinas Perhubungan;
- 5) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 7) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan;
- 8) Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- 9) Dinas Pasar;
- 10) Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- 11) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 12) Dinas Pertanian;
- 13) Dinas Pendapatan Daerah;

- 14) Dinas Sosial;
  - 15) Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  - 16) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
- 1) Inspektorat;
  - 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - 3) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - 4) Badan Kepegawaian Daerah;
  - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - 6) Badan Lingkungan Hidup;
  - 7) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - 8) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - 9) Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;
  - 10) Kantor Ketahanan Pangan;
- d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, yang membagi Wilayah Daerah menjadi 5 (lima) Kecamatan, sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1**



## Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Klojen	a) Kelurahan Klojen; b) Kelurahan Rampalcelaket; c) Kelurahan Samaan; d) Kelurahan Kiduldalem; e) Kelurahan Sukoharjo; f) Kelurahan Kasin; g) Kelurahan Kauman; h) Kelurahan Oro-oro Dowo; i) Kelurahan Bareng; j) Kelurahan Gadingkasri; k) Kelurahan Penanggungan.
2	Blimbing	a) Kelurahan Balearjosari; b) Kelurahan Arjosari; c) Kelurahan Polowijen; d) Kelurahan Purwodadi; e) Kelurahan Blimbing; f) Kelurahan Pandanwangi; g) Kelurahan Purwantoro; h) Kelurahan Bunulrejo; i) Kelurahan Kesatrian; j) Kelurahan Polehan; k) Kelurahan Jodipan.
3	Kedungkan	a) Kelurahan Kotalama;

	dang	b) Kelurahan Mergosono; c) Kelurahan Bumiayu; d) Kelurahan Wonokoyo; e) Kelurahan Buring; f) Kelurahan Kedungkandang; g) Kelurahan Lesanpuro; h) Kelurahan Sawojajar; i) Kelurahan Madyopuro; j) Kelurahan Cemorokandang; k) Kelurahan Arjowinangun; l) Kelurahan Tlogowaru.
4	Lowokwaru	a) Kelurahan Tunggulwulung; b) Kelurahan Merjosari; c) Kelurahan Tlogomas; d) Kelurahan Dinoyo; e) Kelurahan Sumbersari; f) Kelurahan Ketawanggede; g) Kelurahan Jatimulyo; h) Kelurahan Tunjungsekar; i) Kelurahan Mojolangu; j) Kelurahan Tulusrejo; k) Kelurahan Lowokwaru; l) Kelurahan Tasikmadu.
5	Sukun	a) Kelurahan Ciptomulyo; b) Kelurahan Gadang;

		c) Kelurahan Kebonsari; d) Kelurahan Bandungrejosari; e) Kelurahan Sukun; f) Kelurahan Tanjungejo; g) Kelurahan Pisangcandi; h) Kelurahan Bandulan; i) Kelurahan Karangbesuki; j) Kelurahan Mulyorejo; k) Kelurahan Bakalankrajan.
--	--	--

Sumber: Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

- f. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- g. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam rangka memenuhi amanah rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan dengan lebih sederhana dan cepat sehingga dihasilkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Kota Malang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan masih tingginya angka kemiskinan, masih tingginya angka pengangguran, belum optimalnya pemenuhan derajat kesehatan masyarakat, masih adanya kawasan kumuh, kualitas prasarana sarana dan utilitas yang belum memadai, belum optimalnya pengendalian tata ruang kota, sarana dan

manajemen transportasi yang kurang memadai, kualitas lingkungan yang semakin menurun serta reformasi birokrasi yang belum maksimal di bidang tata pemerintahan.

## **2. Sosial**

Gambaran nyata mengenai jumlah sekolah, murid dan guru dan rasio murid terhadap guru dan rasio murid terhadap sekolah di Kota Malang tahun ajaran 2010/2011 untuk jenjang pendidikan TK, dasar sampai menengah. Pada tingkat sekolah dasar (SD) jumlah sekolah yang ada sebanyak 267. Jumlah murid seluruhnya 76.841 murid dan 4.015 guru. Sedangkan jumlah SMP sebanyak 88 sekolah, SMU sebanyak 43 sekolah dan SMK sebanyak 45 sekolah.

Derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal; Mengingat kemajemukan warga Kota Malang terutama dari aspek sosial ekonomi, maka perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Kota Malang. Kebijakan yang dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan kesehatan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Malang termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

## **3. Tingkat Pendidikan**

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat kemajemukan warga Kota Malang

terutama dari aspek sosial ekonomi, maka perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat guna terselenggaranya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat Kota Malang. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyiapan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan pembiayaan pendidikan yang dalam pelaksanaannya, diperlukan pertimbangan kebutuhan pasar tenaga kerja. Upaya lain dalam peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui program pendidikan gratis tingkat SD dan SMP, serta pendidikan gratis tingkat SMA dan SMK bagi siswa Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Jumlah sekolah, murid, dan guru yang ada di kota Malang, dari kelima kecamatan dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Sekolah, Murid dan Guru**  
**Di kota Malang**

Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
Kedungkandang	53	3.367	243
Sukun	65	4.991	285
Klojen	69	3.946	307
Blimbing	60	3.961	303
Lowokwaru	64	3.314	289
Jumlah	311	19.579	1.427

Sumber: Malang dalam Angka, 2015



#### 4. Agama

Kota Malang memiliki banyak tokoh masyarakat yang berpengaruh, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Pengaruh mereka bahkan tidak hanya untuk komunitas mereka sendiri, melainkan juga untuk komunitas lainnya. Realitas ini merupakan potensi yang cukup besar ketika dikaitkan dengan pembangunan di daerah. Manakala terdapat sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat itu, proses pembangunan akan lebih mudah untuk dilakukan.

Jumlah penduduk di kota Malang berdasarkan agama dapat digolongkan sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Kota Malang**  
**Berdasarkan Agama**

Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Lain-lain
Kedungkandang	152,228	7,206	3,231	579	331	74
Sukun	156.726	8.087	8.988	3.515	2.615	-
Klojen	115.682	9.962	7.139	901	1.525	54
Blimbing	133.788	19.464	15.307	1.690	1.585	65
Lowokwaru	152.219	7.417	7.108	801	1.114	-
Jumlah	710.643	52.136	41.773	7.486	7.170	193

Sumber: Malang dalam Angka, 2015

#### 5. Visi Misi Kota Malang

##### a. Visi Kota Malang

Pemerintah Kota Malang mempunyai visi sebagai berikut : Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Kota Sehat dan Ramah Lingkungan, Kota Pariwisata Yang Berbudaya, Menuju Masyarakat Yang Maju dan Mandiri

- 1) Kota Pendidikan Yang Berkualitas, artinya bahwa pembangunan Kota Malang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam arti yang luas.
- 2) Kota Sehat dan Ramah Lingkungan, artinya bahwa pembangunan di Kota Malang diarahkan untuk mewujudkan Kota yang sehat dan berwawasan lingkungan.
- 3) Kota Pariwisata Yang Berbudaya, artinya bahwa pembangunan di Kota Malang diarahkan untuk mewujudkan Kota Malang sebagai kota tujuan wisata dengan tetap melestarikan budaya has Malangan.
- 4) Menuju Masyarakat Yang Maju dan Mandiri, artinya bahwa tujuan pembangunan yang akan dilakukan adalah untuk mewujudkan masyarakat Kota Malang yang maju dan mandiri.

#### **b. Misi Kota Malang**

Untuk mewujudkan visi di atas, misi Kota Malang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas.
- 2) Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat.
- 3) Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang ramah lingkungan.
- 4) Mewujudkan pemerataan perekonomian dan pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya.

- 5) Mewujudkan dan mengembangkan pariwisata yang berbudaya.
- 6) Mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Visi Kota Malang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 jo. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 93 Tahun 2015, yaitu : “Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat”.

## **2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Malang**

Dinas Sosial Kota Malang merupakan pelaksana otonomi daerah dibidang sosial yang beralamat di Jl. Raya Sulfat No.12 Kota Malang.

### **1. Visi dan Misi**

#### **a. Visi**

Terwujudnya Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang sejahtera dan bermartabat.

#### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- 2) Mendorong peningkatan dan perluasan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh Pemerintah dan Masyarakat;
- 3) Meningkatkan sistem informasi dan pelaporan bidang sosial;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang sosial.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Tugas Pokok Dinas Sosial adalah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.
- b. Fungsi
  - 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sosial;
  - 2) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang sosial;
  - 3) Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang sosial;
  - 4) Pelaksanaan pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
  - 5) Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
  - 6) Pelaksanaan pembinaan anak terlantar, para penyandang cacat, panti asuhan/panti jompo, eks penyandang penyakit sosial, eks narapidana, Pekerja Seks Komersial (PSK), narkoba dan penyakit sosial lainnya;
  - 7) Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, pengemis, pemulung, anak jalanan, psikotik;
  - 8) Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
  - 9) Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna, Karang Werda, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Organisasi Sosial (Orsos), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Dunia Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial, Keluarga Pioner dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA);

- 10) Pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan Loka Bina Karya (LBK) Pandanwangi, Barak Sukun, Taman Makam Pahlawan, Makam Pahlawan Trip dan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS);
- 11) Pemberian rekomendasi klien ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), Panti Rehabilitasi Sosial (PRS), Panti Sosial (PS), Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), Panti jompo dan Panti Balita;
- 12) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB);
- 13) Pelaksanaan kegiatan penanganan pengungsi akibat korban bencana;
- 14) Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang sosial;
- 15) Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang sosial yang menjadi kewenangannya;
- 16) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 17) Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 18) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 19) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 20) Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- 21) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;



- 22) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 23) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- 24) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- 25) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;
- 26) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- 27) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- 28) Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- 29) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

### 3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Malang, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Subbagian Penyusunan Program;
  - 2) Subbagian Keuangan;
  - 3) Subbagian Umum;
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
  - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial;
  - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
  - 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial

- 1) Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat dan Penyuluhan Sosial;
  - 2) Seksi Pembinaan Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
  - 3) Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
- e. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, terdiri dari;
- 1) Seksi Bantun Sosial dan Bencana;
  - 2) Seksi Bantuan Advokasi dan Perlindungan Sosial;
  - 3) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

#### 4. Jumlah Penyandang Disabilitas di kota Malang

Salah satu permasalahan social yang dihadapi Pemerintahan Kota Malang adalah pendataan tentang jumlah penyandang disabilitas yang tersebar di lima kecamatan. Pada tahun 2011-2015 Dinas Sosial Kota Malang bersama Surveyor Indonesia mendapatkan data penyandang disabilitas sebanyak 34.510 orang di Propinsi Jawa Timur dan sebanyak 2.250 orang yang terdiri atas 621 orang penyandang fisik, 483 orang penyandang disabilitas mental dan 1.111 orang penyandang disabilitas fisik dan mental (ganda). Terdiri atas : 1.390 dewasa (62%) dan 860 anak-anak (38%).<sup>1</sup>

**Tabel 4.4**

#### **Data Penyandang Cacat Menurut Jenis Kecacatan**

**Tahun 2011**

No	Jenis Kecacatan	Jumlah
1	Cacat Tubuh	32

<sup>1</sup> Hasil wawancara Laily Qodariyah Bagian Rehabilitasi Sosial, Kantor Dinas Sosial Kota Malang, tahun 2017

2	Tunanetra	62
3	Tunarungu	46
4	Cacat Mental	200
	Jumlah	340

Berdasarkan hasil survey yang telah peneliti lakukan diperoleh data penyandang cacat, yang penulis dapatkan dari Kantor Dinas Sosial Kota Malang, bahwa penyandang cacat pada tahun 2011 menggambarkan keadaan kecacatan penyandang cacat menurut jenisnya adalah sebanyak 340 orang. Selanjutnya pada tahun 2015 angka penyandang cacat menurut jenisnya semakin bertambah, pada tahun ini angka penyandang cacat bertambah menjadi 502 orang. Perbedaan dari tahun sebelumnya penyandang cacat ganda tidak ada pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2015, penyandang cacat ganda terdiri dari orang dewasa 5 orang dan anak-anak 2 orang.

**Tabel 4.5**  
**Data Penyandang Cacat Menurut Jenis Kecacatan**  
**Tahun 2015**

	Jenis Kecacatan	Anak	Dewasa	Jumlah
1	Cacat Tubuh	84	179	263
2	Cacat Mental	83	200	283
3	Cacat Ganda	2	5	7
4	Tunanetra	16	72	88
5	Tunarungu	43	46	89
	Jumlah	228	502	730

Selanjutnya data penyandang disabilitas menurut jenis kecacatannya yang teridentifikasi oleh Dinas Sosial Kota Malang untuk dikirim ke panti rehabilitasi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**

**Data Penyandang Cacat Menurut Kecamatan dan Jenis Kecacatan**

**Tahun 2017**

Kecamatan	Cacat Tubuh			Cacat Netra			Cacat Rungu Wicara		
	L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
Blimbing	30	33	63	4	3	7	8	4	12
Klojen	26	14	40	7	2	9	2	-	2
KedungKandang	57	44	101	10	3	13	7	4	11
Sukun	49	23	72	8	8	16	9	3	12
Lowokwaru	28	22	50	8	4	12	5	7	12

Sumber : Dinas Sosial Kota Malang Tahun 2017

**3. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang**

Sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2016. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) merupakan pelaksana otonomi daerah di bidang Pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan, Gedung, Drainase, Air Minum dan Air Limbah, Pembinaan Jasa Konstruksi, Penataan Kawasan Strategis dan Penataan Ruang Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **1. Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang**

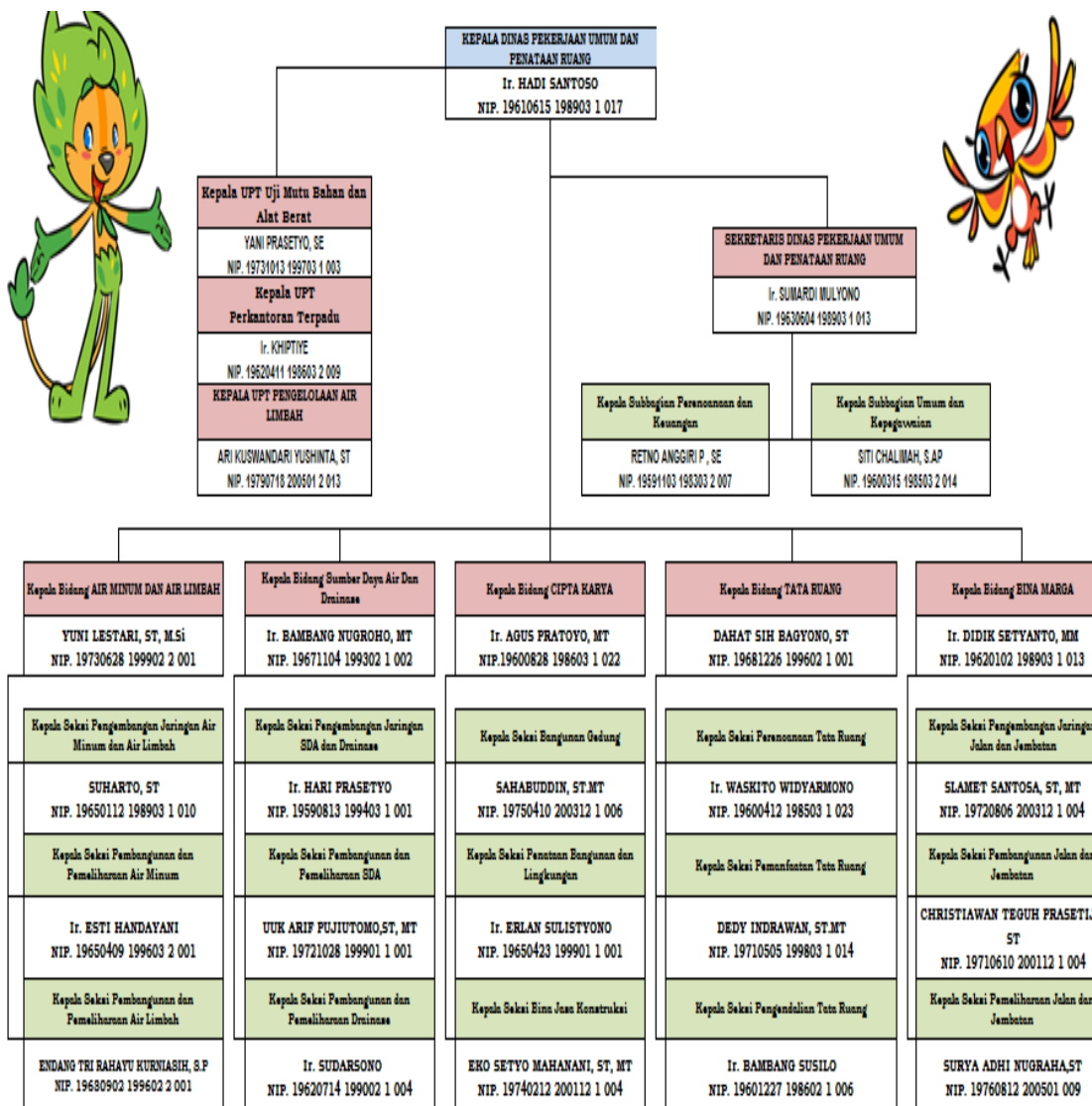
Visi dari Dinas pekerjaan umum kota Malang adalah: Terwujudnya infrastruktur kota yang berkualitas.

### **2. Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang**

- a. Terwujudnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkwalitas
- b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana Permukiman dan Fasilitas Umum;
- c. Terwujudnya Kesesuaian Penataan Ruang dan Bangunan.

### **3. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang**





#### 4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana diatur dalam peraturan walikota malang nomor 27 tahun 2016 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Malang adalah sebagai berikut :

##### a. Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melaksanakan tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

**b. Fungsi**

- 1) penyusunan perencanaan strategis Perangkat Daerah;
- 2) perumusan dan pelaksanaan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 3) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha;
- 5) pengelolaan dan pengembangan SPAM;
- 6) pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan;
- 7) pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam;
- 8) penyelenggaraan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- 9) penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan;
- 10) penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- 11) penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- 12) penyelenggaraan penataan ruang;
- 13) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 14) penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);
- 15) penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;

- 16) penetapan dan pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 17) pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara periodik;
- 18) pengelolaan pengaduan masyarakat;
- 19) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
- 20) pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- 21) pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- 22) penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- 23) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- 24) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

#### **4. Gambaran Umum Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas**

Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Malang dan telah disahkan pada tanggal 30 Bulan Juni tahun 2014. Perda ini terdiri dari 119 pasal yang mencakup tentang:

BAB I yaitu Ketentuan Umum, bab ini hanya satu pasal saja yakni pasal 1.

- BAB II yaitu tentang Ruang Lingkup, bab ini hanya satu pasal saja yakni pasal 2. Selanjutnya adalah
- BAB III yaitu Landasan, Asas dan Tujuan yang terdiri dari 3 pasal saja (pasal 3,4,5).
- BAB IV yaitu tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, bab ini terdapat 25 pasal (pasal 6 hingga pasal 30).
- BAB V yaitu tentang Ketenagakerjaan, bab ini terdapat dari pasal 31 hingga pasal 54.
- BAB VI tentang Kesehatan, bab ini terdapat pasal 55 hingga pasal 69.
- BAB VII yaitu menerangkan tentang Seni, Budaya dan Olahraga, bab ini berisi pasal 70 hingga pasal 72.
- BAB VIII mengatur tentang Politik Hukum yang terdiri dari pasal 73 sampai pasal 79.
- BAB IX yang mengatur penanggulangan Bencana,
- BAB X mengatur tentang Aksesibilitas,
- BAB XI tentang pengarusutamaan penyandang disabilitas,
- BAB XII tentang peran serta masyarakat,
- BAB XIII tentang sumber daya penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas,
- BAB XIV tentang pembinaan dan pengawasan. Perda ini merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk orang difabel yang menjadi sebuah payung hukum serta sebagai respon Pemerintah Kota (pemkot) Malang terhadap kaum difabel.

Perda No 2 Tahun 2014 ini juga berfungsi sebagai pelindung bagi para difabel untuk melakukan haknya.

Munculnya Perda tersebut memiliki beberapa alasan, diantaranya<sup>2</sup>:

- a. Bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan yang lainnya disegala aspek kehidupan dan penghidupan.

---

<sup>2</sup> Lembaran daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2014

- b. Bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang disabilitas diperlukan akses, sarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan sehingga terwujud perlindungan, kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.
- c. Bahwa salah satu wujud perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas adalah perlakuan non-diskriminatif, penyediaan akses, sarana dan prasarana yang memadai dan upaya terpadu serta berkesinambungan dengan pelibatan peran aktif masyarakat
- d. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), perlu membentuk Peraturan Daerah yang dapat melindungi dan memberdayakan penyandang disabilitas.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Dasar pembentukan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 berdasarkan sebagai berikut<sup>3</sup>:

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

---

<sup>3</sup> Ibid



5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
10. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Disabilitas)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Tingkat II Malang
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas
13. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten / Daerah
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis dan ksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Pemerintahan
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah.

Selain Perda No 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, ada beberapa aturan atau pasal yang menunjang hak-hak penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam pasal 1 “penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.”

Pasal 10 BAB IV tentang Kesamaan Kesempatana bahwa “(1) kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas, (2) penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat pada sepenuhnya hidup bermasyarakat. (3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.”

Penyandang cacat berhak mendapatkan kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan dengan melalui penyediaan aksesibilitas. Sedangkan aksesibilitas itu disediakan oleh Pemerintah dan atau masyarakat. tetapi pada kenyataannya Pemerintah masih belum memfasilitasi.

- b. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28 H ayat 2 “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Pasal 28 I ayat 2 “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun yang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perilaku yang bersifat diskriminatif itu.”

Pasal di atas menjelaskan bahwa orang penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan yang khusus terhadap mereka, dan juga mereka harus dijauhkan dari diskriminatif. Sedangkan dalam lapangan masih ada orang difabel yang dikucilkan dan belum mendapatkan perlakuan yang khusus.

- c. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat pada pasal 5 pada ayat 2 “setiap orang yang termasuk kelompok dalam masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih berkenaan dengan kekhususannya.”

Pasal 41 “setiap penca, lansia, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.”

- d. Undang-Undang nomor 43 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat pada pasal 8 tentang aksesibilitas “pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah masyarakat, wajib menyediakan aksesibilitas.”

Pasal 9 “penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan lingkungan menunjang penyandang cacat agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat.”

Dari semua penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang

Disabilitas masih belum efektif atau belum berjalan di lapangan karena memiliki faktor salah satunya belum memiliki anggaran atau dana dan penyediaan aksesibilitas berupa fasilitas dalam angkutan kota masih hanya menyediakan bentuk sosialisasi terhadap supir angkutan saja dan trotoar untuk difabel serta jalan khusus untuk penyandang cacat pengguna kursi roda di terminal arjosari. Dapat dikatakan bahwa peran Pemerintah Kota Malang masih belum apa yang diharapkan masyarakat karena masalah seperti ini, merupakan tugas Pemerintah untuk menciptakan solusi.



**B. Efektivitas Pasal 95 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas mengenai Bangunan Rumah Ibadah di Kota Malang**

Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan

berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya<sup>4</sup>.

Dalam pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan seperti yang disebutkan di atas dan memiliki hambatan lantaran tidak mendapatkan kesetaraan atau yang biasa disebut sebagai aksesibilitas. Berikut beberapa definisi mengenai tunanetra<sup>5</sup>:

1. Tunanetra menurut Departemen Sosial

Tunanetra menurut Departemen Sosial adalah seseorang yang tidak dapat menggunakan indera penglihatannya untuk melakukan aktifitas sosial secara normal.

2. Tunanetra menurut Departemen Pendidikan Nasional (yang sekarang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan)

Tunanetra adalah seseorang yang masih berusia sekolah dengan mata yang tidak dapat melihat tulisan di papan tulis atau buku cetak secara normal.

3. Tunanetra menurut Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni)

Tunanetra menurut Pertuni adalah seseorang yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 font dalam keadaan cahaya normal meski dibantu dengan kacamata (kurang awas).

4. Tunanetra Menurut BPS

BPS menilai seseorang sebagai tunanetra berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan sendiri sebagai informan prime atau dari unsure keluarga sebagai informan sekunder, keterangan mana dicatat oleh petugas atau dituliskan oleh informan dalam formulir.

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang Undang No.19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas

<sup>5</sup>Saharuddin Damming, 2009, Paradigma Perlakuan Negara Terhadap Hak Penyandang Cacat Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Disertasi, Fakultas Hukum Unhas



Pada pembahasan ini, seperti yang dipaparkan dalam latar belakang, peneliti akan menggunakan Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas khususnya pada pasal 95 yaitu aksesibilitas pada sarana peribadatan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam sarana keagamaan;
- b. tempat parkir dan tempat turun penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. bahasa isyarat dalam setiap kegiatan keagamaan.
- e. toilet;
- f. tanda-tanda atau signage.

Selain Pasal 95 sebelumnya juga telah disebutkan dalam Pasal 89 bahwa “setiap pengadan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas<sup>6</sup>”. Pasal 90 (1) penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. (2) penyediaan aksesibilitas dapat berbentuk fisik dan non fisik. (3) penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat dua huruf a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:

- a. Aksesibilitas pada bangunan umum
- b. Aksesibilitas pada jalan umum
- c. Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum
- d. Aksesibilitas pada transportasi umum

---

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2014 Tentang Disabilitas

- e. Aksesibilitas pada sarana keagamaan
- f. Aksesibilitas pada sarana pendidikan
- g. Aksesibilitas pada sarana kesenian, kebudayaan, dan olahraga
- h. Aksesibilitas pada sarana dan jasa keuangan dan perekonomian
- i. Aksesibilitas pada sarana teknologi dan informasi
- j. Aksesibilitas pada sarana politik

Dari pasal di atas bahwasanya sarana dan prasarana umum diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat itu hukumnya wajib. Dalam pasal 95 di mana sarana dan prasarana yang dimaksud adalah tangga naik atau turun, tempat duduk, tanda-tanda atau signage. Jadi menurut peneliti, setidaknya Pemerintah memberikan aksesibilitas berupa fasilitas-fasilitas yang tertera dalam peraturan tersebut. Penyandang cacat berhak mendapatkan kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan dengan melalui penyediaan aksesibilitas. Sedangkan aksesibilitas itu disediakan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.

Penegakan hak asasi manusia ini tentunya menjadi hal yang tak kalah penting bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, selain dimuat dalam Undang Undang Dasar 1945 dan dijabarkan melalui Undang Undang No. 39 Tahun 1999, juga dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Keseriusan pemerintah menegakkan HAM ini juga dapat diperhatikan dengan adanya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Tidak hanya itu, secara umum Undang Undang HAM membagi HAM ke dalam beberapa kategori yang semuanya tertuang secara jelas dalam Undang Undang tersebut, seperti di bawah ini:

1. Hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa.

2. Hak memperoleh keadilan
3. Hak atas kebebasan pribadi
4. Hak atas rasa aman,
5. Hak atas kesejahteraan
6. Hak turut serta dalam pemerintahan
7. Hak wanita
8. Hak anak
9. Hak atas kebebasan beragama

Kesembilan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam Undang Undang HAM tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap HAM di Indonesia. Selain itu, berikut juga ruang lingkup hak asasi manusia, sebagai berikut<sup>7</sup>:

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
- 3) Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- 4) Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
- 5) Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.

---

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, 2006. Filsafat Hukum Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal 91

- 6) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.
- 7) Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
- 8) Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Terkait dengan efektivitas Pasal 95 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas mengenai Bangunan Rumah Ibadah di Kota Malang, berikut adalah hasil wawancara dengan berbagai pihak di antaranya adalah hasil wawancara dengan pihak masjid Jamik sebagai berikut:

Akses ke masjid, dari masjid, dan di dalam masjid agung jamik kota Malang adalah pihak masjid masih belum menerapkan apa yang tertera pada pasal tersebut. Begitu pula dengan cara mengatur tempat parkir bagi penyandang disabilitas di masjid agung jamik kota Malang ini<sup>8</sup>.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh pihak gereja sebagai berikut:

Kalau masalah akses ke gereja, dari gereja, dan di dalam gereja Immanuel Elizabeth kota Malang ini masih belum diterapkan, dan juga tempat parkir bagi penyandang disabilitas semuanya masih belum ada pengaturan secara khusus<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan pihak Masjid Jamik bapak H. Moh. Anwar tanggal 20 Juni 2017 di Masjid Jamik kota Malang.

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan pihak gereja Immanuel Elizabeth bapak Wido Pradipto tanggal 20 Juni 2017 di gereja Immanuel Elizabeth kota Malang.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa mengenai akses bagi penyandang disabilitas di kota Malang ini terkait dengan rumah ibadah yaitu di masjid Jamik Malang masih belum diterapkan sebagaimana dalam Pasal 95 di atas, begitupun mengenai tempat parkir yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas masih belum ada. Hal ini karena kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah yang mengatur hal tersebut kepada pihak pengelola rumah ibadah seperti di masjid Jamik, yang semestinya sebagai masjid Jamik harus menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas sehingga mereka penyandang disabilitas tersebut merasa tidak didiskriminasi oleh masyarakat.

Berlatar dari gambaran umum tentang penyandang disabilitas, yang baik secara fisik maupun mental mengalami gangguan atau biasa disebut dengan disfungsi. Kekurangan inilah yang biasa dirasakan oleh penyandang disabilitas sebagai sebuah diskriminasi sehingga kerap memperoleh perlakuan yang tidak manusiawi. Padahal, selayaknya penyandang disabilitas diperlakukan layaknya manusia biasa walau sebetulnya, diskriminasi juga kerap lahir karena perbedaan ideologi oleh beberapa kelompok tertentu. Namun, hal ini tidak berlaku bagi penyandang disabilitas. Mereka memperoleh perlakuan diskriminatif lantaran karena mereka berbeda secara fisik maupun mental.

Secara konseptual, diskriminasi umumnya terjadi apabila terdapat suatu kelompok atau golongan yang secara formal maupun informal berkedudukan lebih tinggi, atau lebih mapan secara materi, ataupun memiliki kuasa atas suatu kaum. Akibat ini semua, maka kelompok tertentu merasa marah karena kelompoknya diinjak-injak. Natan Lerner pernah mengemukakan bahwa berbagai macam perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami oleh kelompok tertentu, awalnya dimulai dari persangkaan buruk, pengabaian dan hingga sampai pada kebencian yang didasarkan atas perbedaan etnis, ras, atau warna kulit<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Natan Lerner, 1991, Diskriminasi dan Perlindungan HAM, terjemahan PT Sumber Baru, Jakarta., hal:23



Berbeda halnya dengan persamaan alamiah dan persamaan social, persamaan secara hukum dan perundang-undangan terletak pada persamaan seluruh manusia di depan hukum (undang-undang), bukan saja dari segi hak-haknya, tetapi juga dari segi kewajiban dan perlindungan hukumnya. Persamaan inilah yang ditetapkan dalam berbagai konstitusi dan hukum positif dalam negeri serta dalam hukum internasional.

Persoalan diskriminasi ini tentunya tidak seharusnya terjadi. Penyandang disabilitas sama saja dengan manusia biasanya yang memerlukan kondisi lingkungan yang sehat dan tidak berada dalam kungkungan ketakutan akibat diskriminasi yang berkepanjangan. Padahal, manusia selakanya manusia berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Juga bagi penyandang disabilitas yang harus diperlakukan sama dengan yang lainnya. Minoritas bukan menjadi alasan penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlakuan diskriminatif. Penyandang disabilitas juga tak jarang menoreh prestasi di Indonesia, sama dengan nondisabilitas.

Dalam peraturan daerah kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas diperlukan akses, sarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan sehingga terwujud perlindungan, kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas; salah satu wujud perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas adalah perlakuan non-diskriminatif, penyediaan akses, sarana prasarana yang memadai dan upaya terpadu serta berkesinambungan dengan pelibatan peran aktif masyarakat.

Selain akses dari masjid, dalam masjid, dan dari masjid, ternyata mengenai tempat duduk untuk penyandang disabilitas sudah disediakan oleh pihak masjid Jamik kota Malang, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh informan berikut:

Di masjid agung jamik kota Malang ini sudah menyediakan tempat duduk atau tempat istirahat khusus bagi penyandang disabilitas, namun untuk bahasa isyarat dan juga toilet khusus untuk penyandang disabilitas sampai saat ini masih belum pernah ada bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas<sup>11</sup>.

Dari pihak gereja Immanuel Elizabeth mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Iya di gereja Immanuel Elizabeth ini sudah menyediakan tempat duduk atau tempat istirahat khusus bagi penyandang disabilitas, dan untuk bahasa isyarat terkadang kami juga menggunakan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas. Kalau mengenai penyediaan toilet khusus untuk penyandang disabilitas sampai saat ini masih belum ada<sup>12</sup>.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa meskipun pihak pengelola masjid Jamik kota Malang masih belum menyediakan akses bagi penyandang disabilitas dari masjid maupun di dalam masjid dan juga tempat parkir, ternyata pihak masjid sudah menyediakan tempat duduk khusus bagi penyandang disabilitas, hal ini adalah sebagai kepeduliannya kepada penyandang disabilitas, yang mau mereka adalah membutuhkan fasilitas yang khusus dan lain dari masyarakat yang normal.

Ketika peneliti menanyakan mengenai apakah ada tanda-tanda atau signage di masjid agung jamik kota Malang ini bagi penyandang disabilitas? Pihak masjid mengemukakan sebagai berikut:

sudah ada tanda” atau signage yang khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas di masjid Jamik ini mas. Kalau kita ditanya mengenai Pasal 95 Perda

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan pihak Masjid Jamik bapak H. Moh. Anwar tanggal 20 Juni 2017 di Masjid Jamik kota Malang.

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan pihak gereja Immanul Elizabeth bapak Wido Pradipto tanggal 20 Juni 2017 di gereja Immanuel Elizabeth kota Malang.

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas sudah dilaksanakan oleh pemerintah? Selama ini tidak ada penyuluhan tentang pasal tersebut oleh pemerintah, jadi kami kurang faham mengenai Pasal tersebut, dan menurut kami pelaksanaannya juga masih belum efektif karena kami tidak mengetahui tentang isi pasal tersebut<sup>13</sup>

Berikut adalah hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial terkait dengan Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas sudah efektif di rumah ibadah kota Malang sebagai berikut:

Kota Malang ini memiliki Perda tersendiri yang mengatur tentang penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas ibadah yaitu pasal 95 perda kota Malang Nomor 2 Tahun 2014, akan tetapi perda tersebut masih belum dilaksanakan dengan efektif, dan perda tersebut masih belum dilaksanakan di tempat ibadah baik masjid maupun gereja dikarenakan keterbatasan dana yang harus dibagi dengan bangunan umum yang lain<sup>14</sup>

Selanjutnya pihak gereja mengemukakan pendapatnya tentang pelaksanaan pasal 95 perda kota malang nomor 2 tahun 2014 sebagai berikut:

Setahu saya Kota Malang sudah memiliki Perda yang mengatur tentang penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas ibadah perda kota Malang Nomor 2 Tahun 2014, akan tetapi perda tersebut masih belum dilaksanakan dengan efektif terutama di tempat ibadah<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan pihak Masjid Jamik bapak H. Moh. Anwar tanggal 20 Juni 2017 di Masjid Jamik kota Malang.

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial kota Malang yaitu ibu Putri tanggal 17 Juni 2017 di kantor Dinas Sosial kota Malang.

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial kota Malang yaitu ibu Putri tanggal 20 Juni 2017 di kantor Dinas Sosial kota Malang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa meskipun kota Malang telah memiliki perda yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, namun dalam pelaksanaannya masih belum efektif, terutama di rumah ibadah. Hal ini adalah sebagai kelemahan dari pemerintah karena pemerintah kurang memperhatikan tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lebih mengutamakan bangunan umum yang lain daripada tempat ibadah, padahal mereka sebagai penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama seperti masyarakat yang sempurna.

Pasal 1 ayat (4) Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas disebutkan bahwa penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/ atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial. Pada ayat (6) disebutkan bahwa Aksesibilitas adalah kemudahan dan keterjangkauan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan baik fisik maupun non fisik. Dalam hal ini seharusnya bagi penyandang disabilitas perlu mendapatkan perlindungan hukum dan memperoleh hak-haknya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (14) sebagai berikut: Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak - hak konstitusional penyandang disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi.

Teori Efektivitas Hukum yang sering dipakai adalah teori dari seorang pakar hukum bernama Lawrence M. Friedman dengan teori “legal system” yang terdiri dari tiga komponen pokok, antara lain sebagai berikut:

### 1. Substansi Hukum (berupa perundang-undangan)

Yang dimaksud dengan substansi hukum ialah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam system, jadi substansi hukum merupakan sebuah produk hukum materil atau isi dari undang-undang yang mengharuskan norma addresat untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu.

### 2. Struktur hukum (aparap penegak hukum)

Struktur hukum yang merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi. Friedman menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari system hukum adalah struktur hukum, tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga.

### 3. Kultur hukum (perilaku masyarakat)

Maksud dari budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama-sama yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.

Kultur budaya memegang peranan penting dalam sebuah penegakan hukum, dilandasi dengan kebiasaan maka akan terbentuk budaya dimana bisa dijadikan tolak ukur dari suatu aktivitas sosial dimasyarakat. Ketika masyarakat mempunyai kultur budaya baik maka akan selalu menjunjung tinggi suatu kebaikan, namun kenyataannya masyarakat masih sulit untuk taat pada peraturan yang berlaku di Indonesia ini sehingga terkadang hukumnya sudah ada namun realisasinya belum ada sehingga terkesan mati dan tidak berfungsi.

Selain itu, pengertian efektivitas dijelaskan juga oleh Soerjono Soekanto. Kata Efektif adalah merupakan suatu susunan kata yang berasal dari kata effective dalam



artian bahasa Inggris yang memiliki pengertian segala sesuatu yang telah disusun atau direncanakan dapat dilakukan dengan baik dan dapat memberikan dampak dan memberi suatu kemanfaatan. Efektivitas adalah suatu unsur- unsur yang utama yang dipakai atau dimanfaatkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah disusun atau direncanakan dalam kurun waktu sebelumnya. Pada suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya. Efektivitas dapat dikatakan mencapai suatu keberhasilan atau tidaknya dapat ditinjau dari seberapa besar ketercapaian yang didapat dari suatu tujuan yang ditetapkan, jika semakin besar keberhasilann kegiatan dan tujuan dalam mendekati sasaran, maka dapat dikatan semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya.

Pemerintah kota Malang sebagai bagian pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masyarakat Indonesia, menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia untuk membangun dan mewujudkan pemerintahan yang bersifat demokratis dan hendak menyelenggarakan keadilan sosial sekaligus menunjukkan komitmennya terhadap konvesi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan perikemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28A, 28B (2), 28C, 28D, 28G, 28H, 28I UUD 1945.

## **C. Faktor Penghambat dan Solusi Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Ibadah di Kota Malang**

### **1. Faktor Penghambat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Ibadah di Kota Malang**

Keberadaan para penyandang disabilitas (difabel) sudah menjadi suatu keniscayaan di dunia ini khususnya di Indonesia, sehingga ada masyarakat yang memiliki fisik (indera) yang lengkap dari sisi fungsinya dan ada juga yang memiliki fisik (indera) yang kurang

lengkap (cacat). Dari sisi teologis semua itu merupakan kehendak Tuhan yang maha kuasa, tentu Tuhan tidak layak untuk dipersalahkan karena apapun yang ditetapkan oleh Tuhan merupakan suatu bukti keadilan-Nya. Tuhan memberikan kelebihan kepada mereka yang normal di saat yang sama, mereka juga diberikan kewajiban untuk memperhatikan eksistensi hak-hak para penyandang disabilitas di dunia ini, agar hak-hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi dengan mudah.

Manusia yang memiliki kecacatan mental atau lebih dikenal dengan penyandang disabilitas merupakan istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas. Disabilitas telah dihubungkan dengan kekurangan pikiran dan tubuh, yaitu meliputi orang pincang, duduk di kursi roda, menjadi korban keadaan seperti kebutaan, kekurangan pendengaran, sakit jiwa<sup>16</sup>.

Aksesibilitas adalah persoalan yang tidak hanya menimpa penyandang disabilitas. Berbagai kalangan juga turut merasakan miskinnya fasilitas yang terdapat di Kota Malang. Fasilitas umum yang menjadi hak bagi setiap warga tidak dinikmati maksimal oleh warga Malang. Penyandang disabilitas adalah warga Malang yang memiliki kesamaan kesempatan, seperti keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Menikmati fasilitas umum, baik gedung umum, kendaraan umum, maupun segala bentuk fasilitas yang disediakan untuk warga umum. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan

---

<sup>16</sup> Colin Barnes dan Geof Mercer, 2007. Disabilitas, terj. Siti Napsiyah dkk, Jakarta: PIC UIN, hal 1

keagamaan, kegiatan pendidikan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi pendidikan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya. Lingkungan bangunan gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem.

Mengenai hambatan dalam pelaksanaan Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas dapat dipaparkan berdasarkan hasil wawancara berikut:

Hambatan yang ditemui dalam menyediakan akses ke masjid, dari masjid, dan juga akses di dalam masjid agung jamik kota Malang ini bagi penyandang disabilitas adalah pihak pengelola masjid membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan juga tidak dapat bantuan dana dari pemerintah daerah, sehingga hal ini masih belum bisa dilaksanakan dengan baik. Dalam mengatur tempat parkir khusus bagi penyandang disabilitas yang menggunakan fasilitas masjid agung jamik kota Malang selama ini masih jarang sekali bagi penyandang membutuhkan tempat parkir khusus. Begitu pula dalam menyediakan tempat duduk khusus bagi penyandang disabilitas di masjid agung jamik kota Malang juga tidak ada kendala untuk menyediakan tempat duduk

khusus bagi penyandang disabilitas, karena kami sudah menyediakan tempat duduk khusus bagi penyandang disabilitas<sup>17</sup>.

Informan dari pihak gereja Immanuel Elizabeth mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Dalam menyediakan akses ke, dari, dan di dalam gereja Immanuel bagi penyandang disabilitas adalah suatu hal yang membutuhkan pembiayaan, sehingga akses ini masih belum bisa dilaksanakan. Tempat parkir khusus bagi penyandang disabilitas masih belum disediakan karena selama ini jarang penyandang disabilitas yang membutuhkan tempat parkir khusus. Mengenai penyediaan tempat duduk khusus bagi penyandang disabilitas di tidak ada kendala, karena kami sudah menyediakan tempat duduk khusus bagi penyandang disabilitas yang sedang menggunakan fasilitas ibadah ini<sup>18</sup>.

Selain penyediaan tempat parkir dan tempat duduk, jika ada suatu kegiatan di masjid agung jamik kota Malang ini apakah ada pihak yang merasa kesulitan menggunakan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas, dan satu hal lagi mengenai masalah penyediaan toilet khusus bagi penyandang disabilitas, berikut adalah hasil wawancara penulis dengan informan:

Selama ini di masjid Jamik kota Malang masih belum menggunakan bahasa isyarat yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas. Namun kendala kami untuk

---

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan pihak Masjid Jamik bapak H. Moh. Anwar tanggal 20 Juni 2017 di Masjid Jamik kota Malang.

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan pihak gereja Immanuel Elizabeth bapak Wido Pradipto tanggal 20 Juni 2017 di gereja Immanuel Elizabeth kota Malang.

menyediakan toilet khusus bagi penyandang disabilitas adalah merupakan suatu kendala tersendiri, karena hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit<sup>19</sup>.

Apakah dalam pelaksanaan pasal 95 menemui hambatan?

Berikut adalah hasil wawancara dengan pihak dinas sosial kota Malang

hambatan utama pelaksanaan tersebut adalah keterbatasan dana yang mana membutuhkan waktu sekitar 1 atau 2 tahun<sup>20</sup>.

## **2. Solusi Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Ibadah di Kota Malang**

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas sebagaimana dikemukakan oleh beberapa pihak dalam penelitian ini sebagai berikut:

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam menyediakan akses ke masjid, dari masjid, dan juga akses di dalam masjid agung jamik kota Malang ini bagi penyandang disabilitas adalah kami berharap ada suatu bantuan dari pemerintah sendiri untuk membantu menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terutama di masjid ini, agar para penyandang disabilitas merasa lebih nyaman dan memperoleh hak-haknya seperti masyarakat normal pada umumnya<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan pihak Masjid Jamik bapak H. Moh. Anwar tanggal 20 Juni 2017 di Masjid Jamik kota Malang.

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial kota Malang yaitu ibu Putri tanggal 17 Juni 2017 di kantor Dinas Sosial kota Malang.

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan pihak Masjid Jamik bapak H. Moh. Anwar tanggal 20 Juni 2017 di Masjid Jamik kota Malang.



Upaya dalam mengatur tempat parkir khusus bagi penyandang disabilitas yang menggunakan fasilitas masjid agung jamik kota Malang ini adalah tidak ada pengaturan, karena tidak ada tempat parkir khusus bagi penyandang disabilitas<sup>22</sup>

Untuk mengatasi masalah penyediaan tempat duduk khusus bagi penyandang disabilitas di masjid agung jamik kota Malang ini adalah dengan menambah jumlah unit kursi bagi penyandang disabilitas yang mana pihak pengelola mengambil antisipasi jika pada suatu saat ada penambahan jumlah penyandang disabilitas yang datang ke masjid ini<sup>23</sup>.

Jika ada kegiatan yang diikuti oleh penyandang disabilitas di masjid agung jamik kota Malang ini bagaimana cara mengatasi masalah bagi penyandang disabilitas yang tidak memahami, berikut adalah hasil wawancara penulis dengan pihak masjid Jamik kota Malang:

Ketika ada suatu kegiatan, selama ini belum pernah ada masalah yang berarti bagi penyandang disabilitas yang menghadiri acara tersebut, sehingga kami tidak merasa kesulitan mengatasi mereka<sup>24</sup>.

Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Malang jika menemui beberapa hambatan, berikut hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial kota Malang jika ada suatu hambatan bagi penyandang disabilitas Dinas Sosial akan mengupayakan atau

---

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan pihak Masjid Jamik bapak H. Moh. Anwar tanggal 20 Juni 2017 di Masjid Jamik kota Malang.

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan pihak Masjid Jamik bapak H. Moh. Anwar tanggal 20 Juni 2017 di Masjid Jamik kota Malang.

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan pihak Masjid Jamik bapak H. Moh. Anwar tanggal 20 Juni 2017 di Masjid Jamik kota Malang.

mengusulkan tentang pemenuhan aksesibilitas tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum agar DPU melaksanakan perda tersebut.<sup>25</sup>.

Dalam kaitannya hidup bernegara, kewajiban untuk memperhatikan hak-hak para difabel tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah, hak-hak tersebut harus tertuang dalam bentuk peraturan tertulis agar memiliki kekuatan secara yuridis, atas dasar itu dapat kita temukan beberapa regulasi yang khusus memuat substansi perlindungan hak sosial para penyandang disabilitas (difabel) dalam mengakses fasilitas publik dalam berbagai bidang. Misalnya pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. 5 Sedangkan pasal 6 bahwa kesamaan dan kesempatan bagi penyandang cacat diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat, agar dapat berperan dan berintegrasi secara total sesuai kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Maka dari itu, pemerintah membentuk aturan khusus bagi penyandang disabilitas contohnya di Kota Malang yaitu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, yang dimana didalamnya mengatur tentang perlindungan-perlindungan dan pemberdayaan-pemberdayaan baik dalam bidang pendidikan, kesenian, transportasi, dan lain sebagainya. Salah satu cara untuk melindungi para disabilitas adalah memenuhi segala kebutuhan yang mempermudah para penyandang disabilitas untuk melakukan aktifitasnya, yang dimana dalam pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas mengatur aksesibilitas pada sarana peribadatan sebagaimana dimaksud Pasal 90 ayat (3) huruf e, dilaksanakan dengan menyediakan:

---

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial kota Malang yaitu ibu Putri tanggal 17 Juni 2017 di kantor Dinas Sosial kota Malang.

- a. akses ke, dari dan di dalam sarana keagamaan;
- b. tempat parkir dan tempat turun penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. bahasa isyarat dalam setiap kegiatan keagamaan.
- e. toilet;
- f. tanda - tanda atau signage



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pasal 95 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas mengenai bangunan rumah ibadah di kota Malang adalah masih belum efektif, karena pemenuhan aksesibilitas di Kota Malang belum semuanya berjalan dengan baik. Di kota Malang ini banyak ditemukan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas pada bangunan rumah ibadah ataupun pada bangunan umum yang belum memenuhi standar kebutuhan penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik di Masjid Jamik kota Malang maupun di gereja Immanuel Elizabeth Malang masih belum dilaksanakan dengan baik mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hal ini karena masih kurangnya penyuluhan dari pemerintah tentang bangunan rumah ibadah di kota Malang yang menjadikan bangunan rumah ibadah tersebut tidak menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian terbukti bahwa implementasi tersebut masih belum efektif dan tidak berjalan dengan baik.

Peraturan Daerah Kota Malang No 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas masih belum efektif dilakukan dilapangan khususnya pada pasal 95.

2. Hambatan dan solusi dalam efektivitas Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas adalah dengan memperbaiki kinerja pemerintah dengan mengadakan penyuluhan kepada rumah-rumah ibadah dengan menambah atau memberikan fasilitas bagi peyandang disabilitas.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Dinas Pekerjaan Umum agar dalam pelaksanaan fungsi kerja didasarkan atas Kerangka Acuan Kerja (KAK). Dimana KAK harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan berpedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan rumah ibadah, sehingga fasilitas yang tersedia dapat sejalan dengan hak yang harus didapatkan oleh Penyandang Disabilitas. Disarankan pula agar Dinas Pekerjaan Umum dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan aturan yang sudah tertera.
2. Disarankan kepada Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan fasilitas-fasilitas difabel dalam pembangunan rumah ibadah agar mereka dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa.
3. Disarankan kepada Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait agar melaksanakan aturan tersebut guna memenuhi hak-hak disabilitas yang sudah disahkan oleh Pemkot Malang.





## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Dr Taufiqurrahman Syahuri, **Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum**, Jakarta: Kencana, 2011
- Baharuddin Lopa, **Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia**, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa
- Zainuddin Ali, **Filsafat Hukum** Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Sedarmayanti, 2003, **Good Governance, (Pemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Upaya membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Rekonstruksi dan Pemberdayaan**, Mandar Maju, Badung
- Ruswati Suryasaputra, 2006, **Perlindungan Hak Asasi (Bagi kelompok khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan)**, PTIK, Press Jakarta.
- Jayadi Damanik, **Advokasi Dalam Rangka Perlindungan, Pemenuhan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia**, (Makalah dalam Rakernas Pertuni, Januari 2007, Jakarta), hal:3
- Saharuddin Damming, 2009, **Paradigma Perlakuan Negara Terhadap Hak Penyandang Cacat Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia**, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm.51
- Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang, 2009,
- Muhammad Idrus, **Metode Penelitian Ilmu Sosial**, Erlangga, Yogyakarta, 2009
- Saharuddin Damming, 2009, **Paradigma Perlakuan Negara Terhadap Hak Penyandang Cacat Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia**, Disertasi, Fakultas Hukum Unhas
- Zainuddin Ali, 2006. **Filsafat Hukum** Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Colin Barnes dan Geof Mercer, 2007. **Disabilitas**, terj. Siti Napsiyah dkk, Jakarta

## PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

**Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

**Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670

**Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 30/PRT/2006 Bab II Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas**

**Undang-Undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532

**Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas**, Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 9

## INTERNET

<http://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/> (di akses 25 November 2016 15:00)

<http://hukumonline.com/berita/baca/lt564718852feae/memotret-bingkai-hukum-untuk-disabilitas/> (di akses 25 November 2016 15:00)